

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN BELT AND ROAD INITIATIVE
TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA POLITIK EKONOMI
TIONGKOK - ARAB SAUDI TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Dwi Endar Zahrotinnissa Arrabby

18323083

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN BELT AND ROAD INITIATIVE
TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA POLITIK EKONOMI
TIONGKOK - ARAB SAUDI TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Derajat S1 Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

Dwi Endar Zahrotinnissa Arrabby

18323083

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Analisis Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Terhadap Hubungan Kerjasama Politik Ekonomi Tiongkok - Arab Saudi Tahun 2013-2017

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
25 Agustus 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.IP.,B.Int.,St.,MA)

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D
2. Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
3. Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Endar Zahrotinnissa Arrabby
No. Mahasiswa : 18323083
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Belt and Road Initiative
Terhadap Hubungan Kerjasama Politik Ekonomi
Tiongkok –Arab Saudi Tahun 2013-2017.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi ini, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi dilakukan orang lain, serta tindakan-tindakan pelanggaran akademik lainnya yang bertentangan dengan etika yang dijunjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti yang secara menyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Agustus 2022



Dwi Endar Zahrotinnissa Arrabby

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil‘alamin

Karya Penelitian sederhana ini dipersembahkan untuk:

Ayahanda dan ibunda

Terimakasih atas segala do‘a, dukungan, pengorbanan, nasehat, kasih sayang dan semangat yang tak terhingga yang telah diberikan selama ini.

Kakak, Adik dan Keluarga Besar

Terima kasih atas do‘a, nasehat dan bantuan yang telah diberikan selama ini

Teman-teman Dwi

Terima kasih atas dukungan, dan semangat kebersamaan dan perjuangan bersama mendukung hingga pada titik saat ini.

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

QS. Al-Baqarah:286

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi”

Ali bin Abi Thalib



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah *Subhanallahu Wa Ta'alla* Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, serta rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wa sallam* yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian ini terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat, dan dukungan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Phil. Qurotul Uyun, S. Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int., M.A. selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, nasihat, serta ilmu selama masa perkuliahan.
3. Bapak Muhammad Zulfikar Rahmat, B.A., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, serta waktu ditengah kesibukan beliau. Mohon maaf apabila selama proses bimbingan skripsi terjadi kekhilafan kata dan perbuatan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Semoga selalu diberikan kesehatan, dan kemudahan dalam setiap urusannya.
4. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi, memberikan arahan, masukan serta ilmu selama masa perkuliahan.
5. Segenap ibu-bapak dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pelajaran, motivasi dan tidak

hanya ilmu akan tetapi banyak hal yang penulis dapatkan dari ibu-bapak dosen semua. Semoga ibu dan bapak dosen semua selalu diberikan kesehatan dan semoga Allah membalas semua kebaikan ibu dan bapak dosen.

6. Seluruh karyawan di lingkungan Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan, kemudahan, serta kenyamanan dalam pelayanan yang diberikan selama masa perkuliahan.
7. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda serta keluarga besar yang telah mempercayakan penulis dalam setiap proses yang penulis pilih. Terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang yang tak terhingga yang diberikan kepada penulis.
8. Kepada teman-teman terdekatku dan teman sepermainan selama proses perkuliahan ini, terimakasih menjadi saksi dalam perjalanan penulis selama di HI UII baik untuk senang, sedih, susah, dan semuanya. Semoga kalian selalu diberikan kelancaran dalam setiap hal yang kalian perjuangkan dan setiap langkah kalian.
9. Kepada rekan-rekan mahasiswa HI UII angkatan 2018, Masa-masa perkuliahan di HI UII yang penuh canda tawa dan perdebatan yang akan selalu menjadi kenangan yang akan dirindukan. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah kedepannya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran akan membantu untuk perbaikan dimasa mendatang. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Cakupan Penelitian	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.6. Kerangka Pemikiran	12
1.7. Argumen Sementara	16
1.8. Metode Penelitian	17
1.9. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PERKEMBANGAN BELT AND ROAD INITIATIVE	19
2.1. Belt and Road Initiative.....	19
2.1.1. Sejarah Belt and Road Initiative	19
2.1.2. Perkembangan Belt and Road Initiative di Tiongkok.....	25
2.2. Belt and Road Initiative di Arab Saudi.....	27
BAB III PENGARUH KEBIJAKAN BELT AND ROAD INITIATIVE TIONGKOK TERHADAP POLITIK DAN EKONOMI ARAB SAUDI	33
3.1. Pengaruh Sektor Domestik.....	33
3.1.1. Tersedianya Lapangan Pekerjaan	33
3.1.2. Perubahan Pendapatan Anggaran Pemerintah	40
3.2. Pengaruh Sektor Internasional.....	45
3.2.1. Perubahan Struktur Industri	45

3.2.2. Perubahan Sumber Investasi	51
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60



DAFTAR SINGKATAN

AS	Amerika Serikat
BRI	Belt and Road Initiative
CAGR	Compound Annual Growth Rate
CCE	Circular Carbon Economy
CCUS	Carbon Capture, Utilization and Storage
FDI	Foreign Direct Investment
CIF	Collective Investment Fund
HLJC	High Level Joint Committee
IMF	International Monetary Fund
IPO	Initial Public Offering
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
MENA	Middle East and North Africa
MLM	Mekkah Light Metro
NDRC	National Defense Research Committee
OBOR	One Belt One Road
SABIC	Saudi Basic Industries Corporation
UE	European Union
USD	United States Dollar
PDB	Gross Domestic Product
PPB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPN	Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir sudah kerjasama bilateral Tiongkok- Arab Saudi yang terjalin saat baik melalui kebijakan *Belt and Road Initiative* yang bersinergi dengan *Visi Saudi 2030*. *Belt and Road Initiative* ditujukan untuk mengembangkan proyek infrastruktur dan menurunkan biaya transportasi untuk menghubungkan kesepakatan perdagangan lintas batas antara Tiongkok dan negara-negara di sepanjang rute tersebut, tujuan utama BRI Tiongkok adalah untuk mendirikan koridor ekonomi dan jaringan bisnis terbesar di dunia. Arab Saudi merupakan negara yang menggunakan pendapatannya didapat melalui minyak bumi dan sangat terpengaruh oleh penurunan harga minyak bumi membuat tidak stabilnya ekonomi politik Arab Saudi.

Dalam penelitian ini akan membahas terkait pengaruh dari kebijakan *Belt and Road Initiative* yang dijalankan oleh Tiongkok terhadap perkembangan politik dan ekonomi Arab Saudi. Guna menunjukkan ketika suatu negara menjalin kesepakatan kerjasama, akan ada pengaruh yang diperoleh oleh setiap negara yang melakukan kerjasama tersebut. Maka dalam menganalisis permasalahan penelitian ini akan menggunakan konsep dari *Development Diplomacy*.

Kata Kunci: BRI, Arab Saudi, Ekonomi-Politik, *Development Diplomacy*.

ABSTRACT

In recent years, China-Saudi Arabia bilateral and multilateral cooperation has been established both through the Belt and Road Initiative policy in synergy with Saudi Vision 2030. *The Belt and Road Initiative* is aimed at developing infrastructure projects and reducing transportation costs to link cross-border trade agreements between China and countries along the route, China's BRI main goal is to establish the world's largest economic corridor and business network. Saudi Arabia is a country that uses its income obtained through petroleum and is greatly affected by the decline in oil prices making Saudi Arabia's political economy unstable.

In this study, we will discuss the influence of the Belt and Road Initiative

policy carried out by China on the political and economic development of Saudi Arabia. In order to show that when a country enters into a cooperation agreement, there will be authorship obtained by each country that carries out the cooperation. So, in analyzing the problems of this research will use the concept of *Development Diplomacy*.

Keywords: BRI, Saudi Arabia, Political-Economy, *Development Diplomacy*.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan *One Belt one road* (OBOR) atau sekarang lebih dikenal dengan *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan kebijakan luar negeri dan strategi ekonomi republik rakyat Tiongkok. *Belt and Road Initiative* merupakan kebijakan berupa proyek yang mencakup urusan yang berhubungan kebijakan luar negeri Tiongkok yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan perekonomian negara. Kebijakan ini juga sebuah program Tiongkok paling ambisius yang sebagian besar mendiskusikan berkaitan dengan geopolitik sebagai aspek inisiatif dari kebijakan Presiden Xi Jinping yang membentang di benua Asia. Kebijakan ini Bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan ekonomi Tiongkok melalui sebuah program besar pembangunan infrastruktur di seluruh daerah tetangga Tiongkok.

Hal ini di dukung sebagai upaya Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh politik atas negara tetangganya yang tujuan utama *Belt and Road Initiative* adalah menangani persoalan yang ada di Tiongkok dan memperdalam disparitas regional bersamaan dengan modernisasi ekonomi negara. Tiongkok sendiri berharap program pembangunan infrastruktur transnasionalnya akan meningkat dan adanya pertumbuhan dari segala segi aspek di pedalaman Tiongkok yang mengalami keterbelakangan pada perekonomian. Pemerintah Tiongkok juga menggunakan *Belt and Road Initiative* sebagai platform untuk mengatasi kelebihan kronis negara tersebut yang melebihi kapasitas (Cai, 2017).

Sehingga dalam hubungan internasional saat ini yang rumit dan saling ketergantungan yang semakin tinggi pada setiap negara satu dengan yang lain, tidak ada pilihan lain bagi setiap negara untuk tidak mengembangkan kerjasama internasional dengan tetap mengacu pada kepentingan nasionalnya agar negara mereka tidak mengalami kemunduran dalam segala aspek. Hal ini juga berlaku terhadap negara Tiongkok dengan negara Arab Saudi. Secara konsep, tujuan utama dari semua hubungan bilateral antar negara adalah membangun kemitraan yang kuat dengan lingkungan eksternalnya, menciptakan hubungan persahabatan selain itu juga sebagai mencapai keuntungan secara bersama satu sama lain untuk meningkatkan regulasi dan mensejahterakan negaranya (Ekonomi, 2019).

Dari semua hubungan kerjasama bilateral akan ada tujuan pencapaian kepentingan nasional baik dari sektor ekonomi, sosial, dan politik keamanan dimana sektor tersebut yang membuat suatu negara baik-baik saja jika sektor tersebut tidak memiliki permasalahan dan tujuan sektor tersebut berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Adanya beberapa konsep pencapaian dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak ataupun hanya satu negara saja yang diuntungkan dari kerjasama.

Kerjasama antara negara baik dalam hubungan bilateral, multilateral dan regional dibutuhkan oleh suatu negara untuk mencapai suatu negara yang kondusif. Dimana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya

jalanan hubungan kerjasama dengan negara lainnya baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan agar negara tersebut menimbulkan rasa aman kepada masyarakatnya serta membuat negara dapat menjalankan program kerjanya yang telah dirancang (Fulton & Atlantic Council of the United States, 2020).

Dengan adanya konektivitas budaya, politik, ekonomi serta keamanan yang merupakan faktor yang akan muncul dalam pembicaraan masa depan antara Tiongkok dan negara-negara Timur Tengah terutama Arab Saudi dapat meminta bantuan Tiongkok untuk terlibat dalam berbagai masalah politik dan keamanan yang dihadapi banyak negara kawasan. Perekonomian negara Timur Tengah kemungkinan diperkuat dan akan meningkat pengaruhnya terhadap politik Timur Tengah untuk tercapainya bernegosiasi dengan ekonomi yang kekuatan lebih besar seperti Tiongkok, AS, dan UE dalam kasus negara – negara Timur Tengah („One Belt, One Road“ And China“ S Westward Pivot Past, Present and Future, 2017).

Adanya masalah pembangunan ekonomi di Timur Tengah yang telah terakumulasi untuk jangka waktu yang lama juga sebagai keresahan terus menerus yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional Tiongkok. Dimana partisipasi aktif dalam tata kelola ekonomi di Timur Tengah diperlukan untuk menjaga agar Tiongkok berkembang kepentingan regional dan globalnya terutama secara ekonomi sebagian merupakan strategis (Yang, 2014).

Pada awalnya sumber utama dari semua kekacauan dan yang menjadi permasalahan di negara-negara Timur Tengah bukanlah demokrasi

dan kebebasan akan tetapi malah sebaliknya pembangunan ekonomi. Solusi sebenarnya untuk membawa negara-negara Timur Tengah secara bertahap keluar dari kesulitannya adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah di bidang ekonomi pembangunan negara-negara ini, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, dan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tata kelola perekonomian sendiri didasarkan pada untuk mempromosikan reformasi pemerintahan daerah melalui kerjasama antara pihak internal maupun eksternal untuk menyelesaikan masalah di daerah transformasi pembangunan ekonomi dan untuk mendorong ekonomi negara-negara di kawasan ini ke jalur yang benar sehat dan pembangunan berkelanjutan.

Di setiap wilayah negara Timur Tengah masing-masing masih unik dengan ekonomi yang bergantung pada minyak, tidak efisien, struktur negara yang berpikiran keamanan, dan dengan konflik yang sedang berlangsung atau berkepanjangan bersama dengan sentralisasi kekuasaan yang berlebihan di tangan elit negara. Namun, ada batasan berapa lama kebijakan tersebut bisa berlangsung dan perlunya diperhatikan kembali untuk sudah waktunya bagi setiap pemerintah negara di Timur Tengah untuk melakukannya reformasi politik dan ekonomi dan mengubah strategi mereka, saat pendapatan minyak yang menurun seperti halnya adanya tekanan untuk demokratisasi baik dari luar maupun dari dalam meningkat, begitu pula dengan kebutuhan ekonomi kawasan mendorong negara-negara ini menuju kerjasama daripada perang, prospek kerjasama di kawasan ini memang cenderung meningkat (East et al., n.d.).

Timur Tengah sendiri telah lama sebagian besar menjadi negara periferan pada peta kepentingan Tiongkok secara keseluruhan. Namun, Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping yang penekanan lebih besar telah diberikan pada kawasan secara umum dan teluk, khususnya sebuah penekanan yang melampaui kepentingan ekonomi murni. Misalnya, pada “*Arab Policy Paper*” yang dipresentasikan oleh Presiden Xi pada kunjungannya ke Timur Tengah pada awal 2016, menekankan bahwa pada perdagangan dan investasi perlunya memperkuat aspek politik, budaya, dan keamanan hubungan Tiongkok.

Terlebih lagi hubungan Tiongkok dan Arab Saudi telah terjalin lebih dekat sejak tahun 2000, dan perdagangan bilateral melonjak dari \$3 miliar menjadi \$41,6 miliar dalam satu dekade. Minyak merupakan bagian penting dari perdagangan bilateral, dan Tiongkok adalah mitra dagang dan konsumen minyak terbesar Arab Saudi. Permintaan minyak Tiongkok diperkirakan akan meningkat dalam beberapa dekade mendatang karenanya Arab Saudi sangat penting dalam pertimbangan Tiongkok secara keseluruhan di Timur Tengah (Guzansky et al., n.d).

Sejak usulan kembali *Belt and Road Initiative* oleh presiden Xi Jinping pada tahun 2013 telah menarik perhatian dunia. Dimana *Belt and Road Initiative* diusulkan berkoordinasi pada strategi pembangunan antara Tiongkok dan negara lain di bawah kerangka BRI yang menjadi prioritas dalam agenda kebijakan luar negeri Tiongkok. Membuat Arab Saudi tertarik dan pada tahun 2016 Arab Saudi mengumumkan rencana nasional ekonomi Visi Saudi 2030 yang secara resmi dipresentasikan pada KTT

(G20). Sehingga dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah menjalankan kebijakan dengan melihat ke Timur dan dengan giat mengembangkan hubungan ekonomi diplomatiknya bersama Tiongkok dengan bekerja sama dengan di bawah *Belt and Road Initiative*. Selama kunjungan Presiden Xi ke Arab Saudi, Raja Salman menyatakan dukungan resmi untuk *Belt and Road Initiative* Tiongkok, dan menyatakan kesediaan untuk memperdalam kerjasama dengan Tiongkok di berbagai sektor termasuk perdagangan, investasi, energi, teknologi, dan keamanan informasi (Juan et al., 2018).

Hubungan kerjasama antara Tiongkok dan Arab Saudi selama beberapa dekade terakhir ini dalam hubungan bilateral yang telah beralih dari salah satu kepentingan marjinal bagi kedua negara untuk kemitraan strategis yang luas. Bagi Arab Saudi, Tiongkok dipahami sebagai mitra yang dapat diandalkan dan pasar yang strategis untuk ekspor minyaknya yang juga memberikan investasi besar pada fasilitas dan infrastruktur minyak. Dimana kedua negara berupaya untuk meningkatkan jangkauan politik, ekonomi dan diplomatik mereka dan telah membentuk komite pengarah untuk memfasilitasi operasi pembangunan negaranya.

Tiongkok dan Arab Saudi juga bersama-sama membentuk misi koperasi tingkat tinggi untuk mempromosikan keselarasan *Belt and Road Initiative* dan Visi Saudi 2030. Mereka juga telah membangun sinergi dua program dengan menggabungkan *Belt and Road Initiative* dengan Visi Saudi 2030 yang dapat membantu mencapai tujuan pembangunan kedua negara. Tujuan untuk menganalisis pengaruh dari kebijakan *Belt and Road*

Initiative yang dijalankan oleh Tiongkok terhadap perkembangan Politik dan Ekonomi Arab Saudi. (Fulton & Atlantic Council of the United States, 2020)

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh dari kebijakan proyek *Belt and Road Initiative* yang dijalankan Tiongkok dapat mempengaruhi politik dan ekonomi Arab Saudi Tahun 2013-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari kebijakan *Belt and Road Initiative* yang dijalankan oleh Tiongkok terhadap perkembangan Politik dan Ekonomi Arab Saudi tahun 2013-2017.

1.4. Cakupan Penelitian

Cakupan dalam penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh dari kebijakan *Belt and Road Initiative* yang dirancang oleh Tiongkok terhadap Arab Saudi di bidang politik dan ekonomi tahun 2013-2017 adalah ketika Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan pada tahun 2016 ke Riyadh di mana kedua negara menandatangani kesepakatan kemitraan strategis yang komprehensif dan melanjutkan hubungan yang dijalin telah lama. Dimana serangkaian yang disepakati oleh *High Level Joint Committee* (HLJC) itu terdiri dari lima belas kesepakatan dan nota kesepahaman (MoU) ditandatangani meliputi energi, pertambangan, pembangunan perumahan kerjasama budaya, dan kerjasama iptek. Fokus dari perjalanan ini adalah pada ekonomi dengan serangkaian perjanjian

yang ditandatangani dan disepakati kedua negara yaitu mengembangkan kerjasama di bidang energi, mineral, perdagangan, dan investasi.

Tiongkok juga meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi di Arab Saudi dan juga telah mendapatkan kontrak untuk melakukan perombakan sistem jaringan telekomunikasi di Suriah. Sedangkan dalam hubungan politik Tiongkok – Arab Saudi menyerukan kerjasama dalam upaya untuk mengamankan serta menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah serta untuk terus memperkuat gotong royong dan kerjasama di urusan internasional maupun regional. Lalu dilanjutkan HLJC yang diadakan pada tahun 2017 di Riyadh, dengan \$70 miliar yang kesepakatan ditandatangani bersama dengan MoU senilai \$20 miliar oleh *Collective Investment Fund* (CIF) dengan tujuan sebagai dana pengembangan industri yang akan digunakan untuk mengembangkan proyek terkait *Belt and Road Initiative* dan Visi Saudi 2030. (YANG, 2014)

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian tentang kebijakan proyek *Belt and Road Initiative* yang dijalankan oleh Tiongkok-Arab Saudi, sebenarnya sudah ada yang menganalisis permasalahan ini baik dalam buku, jurnal, maupun artikel lainnya. Berikut Penelitian yang penulis anggap cukup relevan untuk penelitian ini.

Dimulai dari tulisan Henelito A. Sevilla Jr (2017) dengan judul *China's New Silk Route Initiative: Political and Economic Implications for the Middle East and Southeast Asia*, berisi tentang diplomasi negara

Tiongkok yang membawa dampak cukup besar terhadap perekonomian di Timur Tengah mengingat adanya kelemahan finansial beberapa negara di Timur Tengah. Terdapat kesulitan untuk membangun infrastruktur dan mempercepat pengiriman ekspor dan impor barang merupakan solusi sebenarnya untuk membawa negara-negara Timur Tengah secara bertahap keluar dari kesulitannya adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah di bidang ekonomi pembangunan negara-negara ini untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dari itu Tiongkok merasa bertanggung jawab dalam membantu negara Timur Tengah khususnya negara Arab Saudi dalam kebutuhan infrastruktur, teknologi, dan komunikasi serta logistiknya.

Dimana Arab Saudi sebagai salah satu sumber alternatif yang sangat potensial investasi dan pasar ke sumber daya bersama mereka, yaitu minyak mentah. Selain dari itu, bergabungnya *Belt and Road Initiative* dalam hubungan kerjasama mereka secara ekstensif dengan ekonomi dunia dan berkontribusi pada keuntungan ekonomi inklusif global seperti namun tidak terbatas pada energi pasar, kereta api, perbankan, dan Pertanggung jawaban pengelolaan, investasi luar negeri Tiongkok di eksplorasi dari pertambangan setiap sektor, demikian juga sebagai pariwisata dan pendidikan (Sevilla, 2017).

Lalu dalam tulisan Zhiqing Zou & Gafar Kara Ahmed dengan judul *China and the Middle East Economic Governance in New Era*, berisi tentang Tiongkok dan negara-negara Timur Tengah sepakat strategi yang

terus meningkat kebutuhan satu sama lain. Wilayah Timur Tengah yang memiliki sumber energi penting di dunia serta jalur perdagangan penting, tujuan utama komoditas, tenaga kerja jasa dan investasi perusahaan serta adanya resiko variable untuk melindungi kepentingan luar negeri Tiongkok - Arab Saudi terkait dengan banyak kepentingan Tiongkok. Permintaan internal Tiongkok dan negara-negara Timur Tengah untuk memperkuat hubungan ekonomi, memperluas interaksi ekonomi bilateral dan memperdalam hubungan ekonomi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, perlunya energi yang aman untuk kelangsungan ekonomi di masa depan dengan mendorong sikap strategis Tiongkok di negara Timur Tengah terlebih pada Arab Saudi melalui kebijakan *Belt and road initiative* telah memperbaikinya secara signifikan partisipasi dalam upaya tata kelola ekonomi global.

Dimana partisipasi dalam pemerintahan ekonomi di Arab Saudi memiliki tahapan baru melalui perdagangan dan ekonomi yang saling menguntungkan pertukaran, dan strategi pengembangan *docking* dengan negara Arab Saudi, Tiongkok telah meningkatkan perekonomian regional lingkungan pembangunan dan kondisi perdagangan. Tiongkok juga bekerja secara intensif untuk mencapai perdagangan bilateral diversifikasi atas dasar perdagangan energi, memanfaatkan pengalamannya dan keuntungan di bidang manufaktur, fasilitas kontrak proyek, infrastruktur dan modal, melalui konstruksi bersama, buruh pelatihan, dan transfer teknologi, untuk meningkatkan saling menguntungkan kerjasama.

Zhiqing Zou & Gafar Kara Ahmed menyampaikan bahwa latar

belakang dari Tiongkok berjuang di tata kelola ekonomi global di wilayah Islam yang luas di Timur Tengah, dapat menjadi terobosan penting bagi Tiongkok untuk secara aktif mempromosikan reformasi dari global ekonomis pemerintahan. Tiongkok secara aktif berpartisipasi di tata kelola ekonomi melalui “*The Belt and Road*” atau *Belt and road initiative* sebagai panduan dan efektivitas tata kelola juga akan menentukan prospek Tiongkok praktek global ekonomis pemerintahan yang bagus pada cakupan di masa depan.

Partisipasi Tiongkok dalam membantu pada tata kelola ekonomi di Timur Tengah memiliki sebuah sangat lebar jangkauan dari pengaruh internal dan eksternal. Pertama, Tiongkok partisipasi di Timur Tengah pada ekonomis pemerintahan telah meningkatkan lingkungan ekonomi dan asing kondisi perdagangan bagi perkembangan negara-negara di kawasan, negara-negara Timur Tengah memiliki masalah tentang infrastruktur, keuangan, pekerjaan dan milik orang mata pencaharian, ditingkatkan pada kemampuan dari pembangunan ekonomi yang mandiri, dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di itu wilayah. Kedua, Tiongkok melakukan pemerintahan filsafat melalui partisipasi di ekonomis pemerintahan Timur Tengah yang lebih jauh menjadi sebuah peserta aktif di lokal dan global ekonomis pemerintahan, dan juga keyakinan proses cakupan dari penerima aturan kepada pembuat aturan. (Zou & Ahmed, 2016)

Sehingga untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tiongkok dan

negara-negara Timur Tengah sepakat strategi yang terus meningkat kebutuhan satu sama lain. Kebijakan *Belt and Road Initiative* yang telah memperbaikinya secara signifikan partisipasi dalam upaya tata kelola ekonomi global. Perekonomian di timur tengah diperkuat dan kemungkinan akan meningkat oleh pengaruh politik Timur Tengah untuk bernegosiasi dengan ekonomi yang lebih besar kekuatan seperti Tiongkok dan bahkan AS dan UE dalam kasus negara-negara Timur Tengah khususnya di Arab Saudi. Penelitian ini ingin mengangkat sudut pandang penelitian baru yang belum pernah diteliti yaitu pengaruh kebijakan *Belt and Road Initiative* secara spesifik kepada Arab Saudi yang merupakan salah satu bagian di kawasan Timur Tengah.

1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis pengaruh dari kebijakan proyek *Belt and Road Initiative* yang dijalankan Tiongkok terhadap politik dan ekonomi Arab Saudi, sebagai acuan analisis penulis memilih untuk menggunakan konsep *Development Diplomacy*. Tujuannya adalah untuk dapat menjabarkan pengaruh-pengaruh yang terjadi terhadap ekonomi dan politik Arab Saudi setelah menjalin hubungan kerjasama kebijakan *Belt and Road Initiative* oleh Tiongkok.

Sederhananya, *Development Diplomacy* adalah sebuah bentuk khusus dari diplomasi publik muncul sebagai label untuk bantuan pembangunan yang merupakan jenis kegiatan spesifik diplomasi publik yang membangun hubungan bilateral atas dasar kegiatan yang disajikan untuk mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan negara-negara

berkembang (Pamment & Zielin'ska, 2016). *Development Diplomacy* merupakan ruang khusus praktik diplomasi yang dilakukan melalui berbagai bentuk bantuan dan bantuan pembangunan antarnegara. Oleh karena itu, *Development Diplomacy* dianggap sebagai bentuk khas diplomasi publik di mana bantuan teknis dan bantuan ekonomi merupakan bentuk-bentuk sumber daya *soft power* suatu negara berdaulat. *Development Diplomacy* adalah hak istimewa bagi negara-negara kaya dan kuat yang menggunakan *Development Diplomacy* sebagai instrumen untuk mencapai berbagai tujuan kebijakan luar negeri mereka. *Development Diplomacy* didasarkan pada klaim pembauran kepentingan domestik dan internasional yang lebih besar dimana *Development Diplomacy* yang berkelanjutan merupakan terampil menavigasi garis tipis dan hubungan antara kepentingan negara, kerja sama luar negeri, pembangunan nasional mereka sendiri, dan tujuan kebijakan luar negeri.

Development Diplomacy merupakan sebuah proses membangun citra positif di luar negeri, yang sebagian besar dilakukan melalui kegiatan multilateral di tingkat global dan regional baik dalam kegiatan organisasi internasional PBB dan organisasi khususnya maupun melalui bentuk kerjasama internasional lainnya. Serta kegiatan hubungan bilateral dan peran pada posisi internasional berdasarkan transfer bantuan yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan negara-negara berkembang. Arah diplomasi pembangunan saat ini mengungkapkan upaya untuk mengkalibrasi ulang hubungan donor

dengan dan di dalam negara berkembang. Hal ini berimplikasi pada *soft power*, *diskursif positioning*, konfigurasi kelembagaan, dan kegiatan operasional. *Development Diplomacy* mengacu pada penggunaan kembali bantuan sedemikian rupa sehingga mengklaim untuk melayani ambisi dan aspirasi diplomasi publik sekaligus mencapai tujuan pembangunan yang merupakan babak baru dalam kerjasama pembangunan bilateral yang menyesuaikan dengan tren ekonomi kontemporer dan realitas geopolitik. Aspek relasional dari *Development Diplomacy* benar-benar bekerja untuk kedua belah pihak yang satu diuntungkan dari bantuan yang diterima, yang lain menuai buah dari bantuan yang diberikan dalam bentuk peningkatan citra dan kemungkinan manfaat di bidang politik dan ekonomi. (Gulrajani et al., 2020)

Instrumen *Development Diplomacy* adalah 'bantuan' yang mencakup kegiatan memberikan sumber daya tertentu secara gratis atau pada kondisi yang lebih menguntungkan daripada yang sudah ada di pasar internasional. Cakupan instrumen *Development Diplomacy* adalah bantuan material seperti makanan, barang, dan obat-obatan, bantuan keuangan yaitu pinjaman atau sumbangan, dan bantuan teknis transfer 'know-how' dan pelatihan. Bentuk bantuan yang paling penting dalam *Development Diplomacy* adalah bantuan ekonomi makro seperti fasilitas kredit untuk menstabilkan nilai tukar, penyeimbang defisit anggaran, utang untuk pemberian dan bantuan struktural berupa pendidikan, pertanian, industri dan tenaga kerja.

Dengan membutuhkan kemauan politik yang dilakukan secara

terbuka dari kedua sisi proses dan kesiapan untuk memberikan bantuan kepada negara lain dari sisi donor dan kesediaan untuk menerima bantuan asing bagi penerima. Tujuan bantuan harus transparan untuk membangun pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan transparan; untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan untuk mendirikan lembaga yang tepat serta dapat diandalkan. Agar *Development Diplomacy* yang berhasil juga memerlukan refleksi yang tepat atas sumber daya soft power, tentang bagaimana mereka dapat menjawab kebutuhan penerima manfaat dan juga melayani kampanye promosi *post factum* (Zielińska, 2016).

Terlepas melalui kebijakan *Belt and Road Initiative* yang dilakukan Tiongkok dan Arab Saudi dimana dari keputusan sebutkan menimbulkan pengaruh pada ekonomi Arab Saudi yang mengalami frekuensi hubungan kerjasama dagang yang terjadi antara dua negara dan meningkatnya anggaran perekonomian Arab Saudi. Pengaruh dari kebijakan *Belt and Road Initiative* terhadap ekonomi Arab Saudi adalah peningkatan frekuensi hubungan kerjasama dagang yang terjadi antara dua negara. Kerjasama dagang tersebut meliputi pelaksanaan proyek bilateral di Arab Saudi, ekspor dan impor, serta investasi yang meningkat merupakan indikasi terjadinya *Development Diplomacy*.

Sementara pengaruh di sektor politik adalah meningkatnya frekuensi kunjungan bilateral antara kedua negara yang melakukan pertemuan pembahasan kerjasama yang membuat kedua negara antara Tiongkok dan Arab Saudi memiliki hubungan yang lebih baik di level

bilateral sehingga menghasilkan lebih banyak kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak yang saling membantu dan memberi keuntungan.

1.7. Argumen Sementara

Pengaruh dari kebijakan *Belt and Road Initiative* yang dirancang oleh Tiongkok terhadap Arab Saudi di bidang politik dan ekonomi dari kerjasama bilateral antara Tiongkok-Arab Saudi dimana kerjasama tersebut berfokus pada pelaksanaan bersama tentang insentif kebijakan, instrumen keuangan, dan kerangka peraturan untuk penerapan hidrogen dan CCUS dalam skala besar sebagai cara mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Melalui *Belt and Road Initiative* dari Tiongkok dan bersinergi dengan Visi Saudi 2030 menjadi awal dari poros perkembangan yang memiliki konsekuensi geopolitik yang penting. Dari kedua kebijakan Tiongkok-Arab Saudi melakukan peningkatan fleksibilitas sistem tenaga untuk pengembangan energi terbarukan dengan rasio tinggi.

Tiongkok dan Arab Saudi saling memfasilitasi kolaboratif yang lebih luas dan kedua negara juga dapat bersama-sama mengembangkan standar untuk memastikan kelestarian lingkungan dan penghitungan karbon untuk perdagangan lintas batas dan integrasi rantai pasokan demi menunjangnya perekonomian dan politik Tiongkok dan Arab Saudi. Keduanya memiliki banyak keuntungan, dimana Tiongkok mencari pasokan energi dan ingin memperluas kepentingan strategisnya dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Sedangkan Arab Saudi di sisi

lain, dapat mengambil manfaat dari bantuan yang diversifikasi hubungan dan memperluas hubungannya dengan kekuatan yang meningkat.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini melakukan dengan pengumpulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang hasil publikasi dari buku-buku, artikel, dan jurnal yang ada dari situs resmi organisasi atau pemerintah yang terkait dengan topik penelitian.

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam subjek dari penelitian ini adalah kebijakan *Belt and road initiative* negara Tiongkok. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengaruh *Belt and road initiative* pada hubungan ekonomi dan politik di negara Arab Saudi.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang didapat adalah berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui buku-buku tentang ilmu hubungan internasional, metodologi penelitian, dan bahan-bahan yang mendukung artikel.

1.8.4. Proses Pengumpulan Data

Di dalam proses penulisannya, penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Dengan demikian, peneliti mencoba menjelaskan secara umum dari masalah yang didapat melalui fakta yang jelas dan lengkap berdasarkan riset penelitian.

1.9. Sistematika Pembahasan

Bab I: Berisi latar belakang penelitian: gambaran secara umum mengenai konsep kebijakan *Belt and Road Initiative*, hubungannya dengan Arab Saudi dari sisi ekonomi dan politik; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; signifikansi penelitian; cakupan penelitian; kajian pustaka; landasan teori; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

Bab II: Menjelaskan konsep sejarah *Belt and Road Initiative* sebagai capaian dari Tiongkok; menjelaskan konsep yang terjadi antara Arab Saudi dan Tiongkok dalam menginisiasi berbagai kerjasama bilateral. Bab ini berfungsi untuk menjabarkan landasan teori dengan menggunakan konsep yang relevan pada perumusan masalah yang diteliti.

Bab III: Mengulas dari analisa perbandingan perkembangan kerjasama bilateral Arab Saudi dengan Tiongkok di masa sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan. Bab ini menjelaskan tentang implementasi yang telah terjadi kepada politik dan ekonomi Arab Saudi setelah kebijakan dijalankan.

Bab IV: Membahas kesimpulan dari hasil analisis penelitian berdasarkan konsep-konsep yang sesuai. Di akhir penelitian, bisa memberikan rekomendasi dan saran jika ada.

BAB II

PERKEMBANGAN BELT AND ROAD INITIATIVE

2.1. Belt and Road Initiative

2.1.1. Sejarah Belt and Road Initiative

One Belt One Road Initiative diubah pada tahun 2017 saat ini disebut sebagai *Belt and Road Initiative* merupakan jalur sutra salah satu proyek infrastruktur dari kebijakan luar negeri dan ekonomi paling ambisius. Sebagian besar diskusi berkaitan dengan geopolitik sebagai aspek inisiatif Tiongkok. Diluncurkan tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping, yang merupakan kumpulan besar inisiatif pembangunan dan investasi akan membentang dari Asia Timur ke Eropa dengan secara signifikan memperluas pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok. Penamaan jalur sutra sebenarnya tidak pernah ada dimasukkan ke dalam transkrip sejarah Tiongkok, jalur sutra diciptakan pada tahun 1877 oleh ahli geografi Jerman Ferdinand von Richthofen yang menyebutnya "Seidenstrasse" (jalan sutra) atau "Seidenstrassen" (rute sutra).

Dalam sejarah Tiongkok, *Belt and Road Initiative* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jalur alami dan jalur non-alami. Rute alami dipahami sebagai alami dan pada dasarnya dirumuskan oleh tektonik geologis rute buatan atau non-alami dibuat oleh manusia atau buatan manusia. Namun demikian, secara simultan terdapat jenis-jenis jalur yang terintegrasi antara jalur alami dan jalur buatan sebagian dibuat oleh alam dan sebagian dibuat oleh manusia. Jalur alam biasanya dikaitkan dengan jalur sungai dan pada dasarnya ditemukan oleh orang-orang yang

menjelajahi dan membuka untuk tujuan perdagangan dan budaya. Untuk saat ini, muncul stasiun dan pelabuhan untuk rute buatan, yang merupakan temuan dan dibangun oleh manusia. Jalur sutra kuno untuk jenis rute yang menghubungkan peradaban besar di Asia, Eropa, dan Afrika, secara kolektif disebut jalur sutra oleh generasi selanjutnya. Sebagai tipe lain, sistem kanal atau sungai buatan terpanjang sekaligus tertua di dunia dibuat berdasarkan keinginan manusia, atau sistem sungai yang digali terhubung satu sama lain dan terhubung dengan sistem sungai alami (“Silk Road to Belt Road,” 2019).

Awalnya, jalur sutra menandai awal dari hubungan komersial antara Tiongkok dan dunia barat dari zaman kuno hingga zaman modern. Namun, volume perdagangan di sepanjang rute ini berkurang secara signifikan pada awal abad ketiga belas, setelah pecahnya Kekaisaran Mongol. Dalam konteks ini, Jalur Sutra masih cukup kuat bagi Marco Polo yang mencatat perjalanannya ke Tiongkok dalam memorinya yang diselesaikan pada tahun 1299. Seiring berjalannya jalur sutra muncul selama ekspansi ke barat Dinasti Han China (206 SM-220 M), untuk menjalin jaringan perdagangan di seluruh negara-negara Asia Tengah yang sekarang adalah Afghanistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan serta India modern dan Pakistan di selatan rute-rute itu membentang lebih dari empat ribu mil ke Eropa. Asia Tengah yang merupakan pusat dari salah satu gelombang pertama globalisasi yang menghubungkan pasar timur dan barat, mendorong

kekayaan yang luar biasa, dan memadukan tradisi budaya dan agama. Juga sebagai jalur untuk penyebaran perdagangan sutra, rempah-rempah, batu giok, dan barang-barang berharga Tiongkok lainnya pindah ke barat sementara Tiongkok menerima emas dan logam mulia lainnya, gading, dan produk kaca.

Jalur sutra juga berfungsi sebagai yang menggambarkan cara orang berbudaya dan benua menjalin hubungan bersama dengan demikian membantu lebih memahami cara penyebaran agama dan bahasa di masa lalu, sambil menunjukkan bagaimana gagasan tentang makanan, mode, dan seni disebarluaskan, bersaing, dan dipinjam satu sama lain. Jalur sutra sebagai memperjelas sentralitas kontrol sumber daya dan perdagangan jarak jauh, dan karena itu menjelaskan konteks dan motivasi ekspedisi melintasi gurun dan lautan yang membantu membentuk kerajaan. Melalui jalur sutra menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dirangsang melintasi ribuan mil, dan bagaimana kekerasan dan penyakit sering kali mengikuti pola kehancuran yang sama. Penggunaan rute tersebut mencapai puncaknya selama milenium pertama yang di bawah kepemimpinan Kekaisaran Romawi pertama dan kemudian Bizantium, dan Dinasti Tang (618–907 M) di Cina (Cai, 2017).

Selain itu, *Belt and Road Initiative* sebenarnya merupakan konektivitas antara gurun dan pelabuhan, konektivitas antara unta dan perahu, dan konektivitas jalan, rel, dan rute laut antara Tiongkok pedalaman dan Tiongkok ke dunia global. Terlebih lagi adalah konektivitas dan

kemunculan kembali tradisi dari Jalur Sutra kuno dari Dinasti Han, Dinasti Yuan dengan sabuk ekonomi Jalur Sutra, dan menghubungkan jalur laut laut Zheng He dengan jalur laut saat ini. Kembalinya pendahulu di masa lalu dan tradisi Shaanxi yang dikombinasikan dengan tradisi pesisir Fujian, Jiangsu, dan Shanghai sehingga ditemukan adanya *Belt and Road Initiative* saat ini. Sebagaimana disebutkan di atas, Presiden Tiongkok Xi Jinping adalah orang pertama yang mengajukan kembali gagasan dan mengusulkan *Belt and Road Initiative* pada 7 September 2013, diikuti oleh Partai Komunis Tiongkok yang melaksanakan gagasan proyeknya dengan resolusi menyerukan pembangunan sabuk ekonomi jalur sutra darat dan jalur sutra maritim.

Pada abad ke 21 bertepatan pada 13 Desember 2013 dalam konferensi tahunannya tentang tugas-tugas ekonomi, ia juga berfokus pada proyek tersebut. Pada 15 Mei 2017, pada konferensi puncak tentang *Belt and Road Initiative* di Beijing, Presiden China Xi Jinping sendiri yang memimpin pertemuan tersebut. *Belt and Road Initiative* adalah tentang konektivitas timbal balik melalui benua Eurasia namun, sekarang melampaui dan mencapai Afrika dan Amerika Latin, platform kerjasama global melalui udara, darat, laut, dan internet. Berupa teknologi yang sangat canggih yang merupakan tujuan utama dari *Belt and Road Initiative* adalah untuk membangun infrastruktur dimana dulu dunia menderita karena infrastruktur yang buruk serta bagian barat termasuk Amerika Serikat menderita karena modal swasta yang tidak tertarik untuk berinvestasi dalam

infrastruktur karena infrastruktur tidak menghasilkan uang setidaknya dalam jangka pendek. Namun, Tiongkok dapat melakukannya karena memiliki perusahaan milik negara yang sangat kuat dan memikirkan jangka panjangnya dan pendukung lainnya memiliki kepemimpinan yang kuat di Partai Komunis NDRC.

Sehingga Tiongkok memiliki tujuan dari inisiatif ini adalah membantu Tiongkok untuk mencapai tujuan geopolitik dengan ekonomi mengikat negara-negara tetangga Tiongkok lebih dekat ke Beijing. Yang mendasari dorongan global Tiongkok adalah gagasan Presiden Xi untuk mengubah Tiongkok menjadi negara industri yang sepenuhnya berkembang dengan kekuatan dan pengaruh Tiongkok yang berkembang tetapi ada banyak tujuan yang lebih konkrit dan ekonomis di balik *Belt and Road Initiative* yang tidak boleh dikaburkan dengan fokus pada strategi. Tujuan *Belt and Road Initiative* yang paling dapat dicapai adalah kontribusinya terhadap meningkatkan kemampuan manufaktur Tiongkok.

Mengingat kemampuan Tiongkok untuk membiayai proyek dan pengaruhnya atas penerima pinjaman ini, membuat barang-barang industri kelas atas seperti kereta api berkecepatan tinggi, listrik peralatan pembangkit, dan peralatan telekomunikasi cenderung digunakan secara luas di negara-negara *Belt and Road Initiative*. Kurang adanya kepercayaan politik antara Tiongkok dan beberapa negara *Belt and Road Initiative*, serta ketidakstabilan dan ancaman keamanan di negara lain adalah hambatan yang cukup besar. Tujuan utama *Belt and Road Initiative* Tiongkok adalah

untuk mengatur koridor ekonomi terbesar dan jaringan bisnis di dunia *Belt And Road Initiative* berfokus pada pembangunan konektivitas melalui sarana ekonomi, pembangunan, dan *people-to-people*, kerjasama keamanan dan militer jelas tidak ada dalam Visi dan Aksi. Ini memperkuat pernyataan Presiden Xi bahwa *Belt and Road Initiative* “bukanlah alat untuk memajukan agenda geopolitik, tetapi untuk platform kerjasama ekonomi”. (Cai, 2017)

Ada tiga motivasi utama dicetuskannya *Belt and Road Initiative*, yang pertama paling sering dibahas secara internasional adalah persaingan Tiongkok dengan AS. Sebagian besar perdagangan internasional Tiongkok melewati laut melalui selat Malaka di lepas pantai Singapura yang merupakan sekutu utama AS. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya Tiongkok untuk menciptakan rute perdagangannya sendiri yang lebih aman alasan utama kedua untuk inisiatif ini adalah warisan dari krisis keuangan pada tahun 2008. Pemerintah Tiongkok menanggapi keadaan darurat dengan stimulus 4 tahun, mengeluarkan kontrak untuk membangun kereta api, jembatan, dan bandara, tetapi menjenuhkan pasar Tiongkok dalam prosesnya. Sehingga pada kerangka *Belt and Road Initiative* ini juga menyediakan pasar alternatif bagi perusahaan milik negara Tiongkok yang luas di luar perbatasan Tiongkok.

Terakhir, *Belt and Road Initiative* dipandang sebagai elemen penting dalam upaya pemerintah Tiongkok untuk merangsang ekonomi di daerah tengah negara yang secara historis tertinggal di belakang wilayah

pesisir yang lebih kaya. Sehingga Pemerintah menggunakan *Belt and Road Initiative* untuk mendorong dan mendukung bisnis di wilayah tengah ini, mengalokasikan anggaran, dan mendorong bisnis untuk bersaing mendapatkan kontrak *Belt and Road Initiative* (Chatham house, 2021).

2.1.2. Perkembangan Belt and Road Initiative di Tiongkok

Skema besar Tiongkok dari *Belt and Road Initiative* karenanya sebagai upaya Tiongkok untuk menemukan kembali tradisi dan institusi hubungan luar negerinya dalam ingatan masa lalu agar dapat kembali membangun tatanan dunia regional. Hal ini merupakan tentang revitalisasi hubungan komersial dan budaya dari sejarah pada jalan sutra dan pemerataan kembali sistem anak sungai yang merupakan politik simbolis pada saat yang sama. Pada proyek Jalur Sutra baru, mengingat melalui prospek ekonominya terutama didorong oleh imajinasi budaya *Pax Sinica* yang bersejarah pada tatanan dunia yang sebagian besar terfragmentasi di era modern.

Dalam prosesnya, Tiongkok berusaha untuk melampaui kekakuan konsepsi Westphalia tidak berarti Tiongkok akan melampaui kedaulatan tetangganya. Dimana hanya memiliki konsepsinya saja tentang hubungan antar negara dan pemahaman yang lebih fleksibel tentang batas-batas komunitas politik. Yang dibudidayakan oleh sistem anak sungai tradisional, Tiongkok tidak memahami hubungan luar negeri dalam istilah yang relatif abstrak sebagai hubungan antar negara atau tentang negara dan komunitas politik, yang merupakan produk politik dari sejarah dan pandangan dunia

barat dan semakin ditemukan sebagai mitos dalam praktik aktual (Osiander, 2001).

Awalnya hanya mencakup 18 provinsi yang terlibat pada proyek ini, tetapi saat ini semua provinsi Tiongkok ikut terlibat pada proyek *Belt and Road Initiative ini*. Dimana Xinjiang adalah daerah inti dari sabuk ekonomi, dan Fujian adalah daerah inti Jalur Sutra maritim karena Xinjiang adalah seperenam dari wilayah Tiongkok. Xinjiang memiliki delapan negara tetangga, termasuk Fujian, Quanzhou adalah kota yang sangat kuno dari Marco Polo yang di daerah Persia dan banyak orang Arab pernah tinggal di sana kemudian hubungan Tiongkok dengan negara tetangga semakin dekat. Lima tahun lalu, dari Chongqing ke Jerman yang menghasilkan memiliki ekspres Tiongkok-Eropa pertama. Sekarang lebih dari 24 kota dan 19 negara di Eropa terhubung dengan 23 kota di Tiongkok, lebih dari 7000 putaran kereta per tahun untuk menghubungkan Tiongkok dan Eropa (“Silk Road to Belt Road,” 2019).

Pemerintahan Xi memiliki tujuan untuk melindungi terhadap kawasan dengan mendukung kedua kekuatan lokal, Tiongkok berusaha meminimalkan paparan risiko misalnya gangguan pada pasokan energi di Tiongkok jika terjadi sebuah krisis dan untuk memaksimalkan peluang mengatur hubungannya dengan negara-negara Teluk Persia pada pijakan yang stabil tanpa secara substansial melemahkan hegemoni AS. Dengan adanya *Belt and Road Initiative* bertujuan untuk mencapai lima tujuan penting di antara negara-negara konstituennya yaitu: koordinasi kebijakan,

konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan dan ikatan antar masyarakat (Garlick & Havlová, 2020).

Secara rinci, *Belt and Road Initiative* dirancang untuk membangun jaringan konektivitas all-dimensional, *multi-tiered*, composite konektivitas Asia, Eropa dan Afrika, pada laut yang berdekatan dengan memperkuat komunikasi kebijakan, konektivitas jalan, link perdagangan, sirkulasi mata uang, *people to koneksi* dan pertukaran budaya. Tiongkok menggunakan Pendekatan seperti mengembangkan keuangan, tidak hanya mengandalkan pasar tetapi Tiongkok membangun seolah memiliki tangan yang tidak terlihat dan tangan yang terlihat yang bekerja bersama. Tiongkok menciptakan pasar untuk membangun pasar bagi negara-negara tersebut. Itu adalah rahasia model Tiongkok dengan menggunakan *Belt and Road Initiative*; itulah alasan mengapa Barat tidak bisa melakukan ini tapi Tiongkok bisa (“Silk Road to Belt Road,” 2019).

2.2. Belt and Road Initiative di Arab Saudi

Berdasarkan jejak data dalam tiga tahun terakhir, kedua kepala negara saling mengunjungi dan membuat komite gabungan tingkat tinggi Tiongkok-Arab Saudi yang telah memainkan peran semakin penting dalam membimbing dan mengkoordinasikan kerja sama. Kemitraan strategis yang komprehensif antara kedua negara terus diperdalam dan *Belt and Road Initiative* telah bersinergi lebih lanjut dengan Visi Saudi 2030. Tiongkok telah menandatangani 30 perjanjian kerjasama besar dengan Arab Saudi, yang mencakup bidang-bidang seperti energi, keuangan, investasi, perumahan, sumber daya air,

pemeriksaan kualitas, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, pos, telekomunikasi, dan media. Pola baru kerja sama menyeluruh antara Tiongkok dan Arab Saudi sedang terbentuk, dan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-Arab Saudi terus diperkaya.

Sehingga *Belt and Road Initiative* melibatkan pendekatan *regionalisasi* untuk kebijakan luar negeri di mana ekonomi Tiongkok disesuaikan dengan tuntutan pengaturan lokal dengan harapan meningkatkan intra sinergi *regional*, sebagai implementasi tujuan kebijakan untuk menuntut pengembangan hubungan politik dan ekonomi dengan kedua kekuatan regional tanpa memusuhi keduanya. Tiongkok berharap untuk mempengaruhi pembangunan regional ke arah peningkatan ikatan dan konektivitas demi pertumbuhan ekonomi yang akan menguntungkan keduanya dan mitranya. pemerintah Tiongkok menyadari bahwa tidak dapat menyelesaikan masalah dari persaingan lokal yang mengakar.

Sejak *Belt and Road Initiative* diumumkan oleh Tiongkok pada tahun 2013, *Foreign Direct Investment* (FDI) Tiongkok di Arab Saudi yang bertujuan untuk menghidupkan kembali *Belt and Road Initiative* yang menawarkan platform baru untuk kerjasama yang telah menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Kerajaan Arab Saudi, yang merupakan sebagai mitra dagang terbesar Tiongkok di Timur Tengah, memainkan peran kunci dalam tata letak geografis *Belt and Road Initiative* yang terlebih Arab Saudi merupakan salah satu negara pertama yang merespon positif BRI. *Belt and Road Initiative* membawa Tiongkok lebih dekat ke Arab Saudi sebagai kunci utama *Belt and Road Initiative* di Timur Tengah. *Belt and Road Initiative* menawarkan peluang

potensial yang besar bagi Kerajaan Arab Saudi dalam hal pembangunan infrastruktur, kerjasama energi, teknologi dan keuangan, pertukaran budaya, keamanan dan pertahanan.

Tujuan strategis *Belt and Road Initiative* adalah untuk meningkatkan hubungan infrastruktur dan logistik serta merangsang kegiatan perdagangan dan investasi. Visi Saudi 2030 bertujuan untuk membangun ekonomi yang terdiversifikasi yang tidak bergantung pada minyak bumi. Yang dipelopori oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, melalui Visi Saudi 2030 menyediakan peta *Road* untuk pengembangan *Belt and Road Initiative* sektor ekonomi baru, termasuk pariwisata dan hiburan, untuk transformasi signifikan menuju ekonomi digital berbasis pengetahuan. Implementasi *Belt and Road Initiative* di Arab Saudi menambah keharusan untuk peningkatan infrastruktur dan pengembangan industri pembaharuan. Arab Saudi terletak di perhubungan strategis yang unik dari tiga benua: Afrika, Asia dan Eropa. Setelah didirikan hubungan diplomatik pada tahun 1990, Arab Saudi dan Tiongkok telah melihat perkembangan hubungan bilateral yang baik. Sejak 2015, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Arab Saudi yang telah menjadi salah satu pemasok utama Tiongkok untuk minyak mentah selama bertahun-tahun yang terdapat pada Teluk Persia (Alqahtani, 2019).

Dimana Teluk Persia adalah zona persaingan kepentingan yang di dalam kompleks Iran dan Arab Saudi mungkin adalah dua kekuatan regional yang paling signifikan. Sementara Amerika Serikat yang lebih menyukai Arab Saudi daripada Iran, mendominasi secara militer. Teluk adalah sumber sebagian besar

minyak dunia, termasuk impor lebih dari setengah dari impor minyak Tiongkok mencapai pelabuhannya melalui Selat Hormuz, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan, dengan 17 % berasal dari Arab Saudi pada 2014 (EIA, 2015). Timur Tengah Raya juga meningkat terutama bidang utama untuk Tiongkok *Belt and Road Initiative* Tiongkok, yang seolah-olah bertujuan untuk menciptakan sinergi ekonomi baru “win-win”, melalui peningkatan konektivitas infrastruktur perdagangan dan transportasi sementara pada saat yang sama memajukan kepentingan keamanan nasional komprehensif Tiongkok (Ferdinand, 2016; Rolland, 2017).

Saat Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud mengunjungi Tiongkok pada bulan Maret 2017 setelah sebelumnya Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi pada Januari 2016. Selama kunjungan Raja Salman, kedua negara secara signifikan mengangkat hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis yang komprehensif. Terlebih lagi, Raja Salman menandatangani sejumlah kesepakatan kerjasama investasi senilai 65 miliar USD. Demi mereformasi ekonominya yang sangat bergantung pada minyak, yang pemerintahan Kerajaan Arab Saudi mengumumkan rencana ambisius strategi pertumbuhan pada Visi Saudi 2030.

Strategis reformasi ini bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi dan sumber pendapatan jauh dari sektor minyak bumi, sementara mendorong partisipasi sektor swasta dan mengembangkan ekonomi berkelanjutan berbasis pengetahuan. Kemitraan strategis komprehensif Tiongkok– Arab Saudi di energi, industri, perdagangan, teknologi, pertahanan, dan budaya mencerminkan

pentingnya Arab Saudi untuk *Belt and Road Initiative* Tiongkok. Seperti yang ditunjukkan oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman, tujuan *Belt and Road Initiative* Tiongkok sepenuhnya sejalan dengan Visi Saudi 2030 yang diadopsi pada tahun 2016 dengan tujuan untuk memodernisasi Arab Saudi, mendiversifikasi ekonominya, dan mengurangi ketergantungan pada minyak (Council, 2020).

Selain itu, Tiongkok berkolaborasi dengan Arab Saudi di sejumlah besar sektor di mana kekuatan Saudi dan Tiongkok saling melengkapi. Kerja sama Tiongkok-Saudi yang lebih dalam juga dapat mencerahkan prospek Visi Saudi 2030. Visi Saudi 2030 merupakan sebuah langkah pertama dalam upaya radikal untuk mengubah ketergantungan Arab Saudi pada minyak, tetapi juga ekonomi politik fundamentalnya sebagai cara negara dan ekonomi berinteraksi. Reaksi dan interaksi antara negara, masyarakat, dan bisnis yang akan mendatang akan menentukan tempat Arab Saudi di kawasan dan sistem internasional selama beberapa dekade mendatang. Implementasi Visi Saudi 2030 memberikan peluang besar bagi Tiongkok untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dan investasinya serta meningkatkan ekonomi industri domestiknya.

Sehingga seluruh rantai industri, energi dan pengembangan teknologi baru, selaras dengan kerangka kerja sama Tiongkok-Arab Saudi. Ini secara umum dapat memfasilitasi konvergensi peraturan untuk pertumbuhan perdagangan dan investasi di kawasan, yang mendukung kerja sama Tiongkok- Arab Saudi. Namun, *Belt and Road Initiative* akan memperluas kerjasama kapasitas industri di kawasan ini. pendirian dan pengoperasiannya telah meningkatkan koordinasi

lintas pemerintah dan swasta untuk melaksanakan proyek-proyek *Belt and Road Initiative*. Jika ekspansi ini tidak direncanakan dengan baik dalam hal diferensiasi produk atau pasar, dapat menyebabkan kelebihan kapasitas. Dengan demikian, kerjasama yang dapat meningkatkan persaingan antara Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya (“Silk Road to Belt Road,” 2019).

Arab Saudi mulai mengembangkan industri petrokimia yang modal proyek petrokimia ini diinvestasikan Saudi di Tiongkok akan mencapai \$35 miliar, dengan total proyeksi produksi 21,7 juta ton pada tahun 2025. Investasi Tiongkok di Arab Saudi sebagai bagian dari *Belt and Road Initiative* yang meliputi dari proyek konstruksi, pembangunan infrastruktur, investasi dalam penelitian bersama, dan fasilitas pelatihan di bidang telekomunikasi. Proyek paling signifikan yang dilaksanakan oleh perusahaan dari Tiongkok di Arab Saudi termasuk kesepakatan yang dibuat yaitu membangun *Mekkah Light Metro* (MLM) oleh *China Railroad Construction Company*. MLM dioperasikan hanya dalam enam belas bulan, memberikan kemudahan transportasi yang signifikan bagi jutaan Muslim yang bergabung dengan haji 2011. Proyek ini menjadi sukses besar di dunia Muslim dan kontribusi budayanya terhadap kerjasama Tiongkok-Arab Saudi jelas melebihi nilai ekonominya (CGTN, 2018).

BAB III

PENGARUH KEBIJAKAN BELT AND ROAD INITIATIVE TIONGKOK TERHADAP POLITIK DAN EKONOMI ARAB SAUDI

Setelah memahami bagaimana sejarah dan perkembangan hadirnya *Belt and Road Initiative* di Tiongkok maupun Arab Saudi, serta memahami bagaimana perkembangan kerjasama itu berjalan di Arab Saudi. Maka pada bab ini penulis akan mengelaborasi Pengaruh dari kebijakan proyek *Belt and Road Initiative* yang dijalankan Tiongkok terhadap politik dan ekonomi Arab Saudi dengan konsep *Development Diplomacy*. Pada bagian BAB ini, penulis akan melanjutkan materi yang telah disajikan pada bagian BAB sebelumnya, sehingga dengan adanya analisis di bagian ini mampu untuk menjawab rumusan masalah.

3.1. Pengaruh Sektor Domestik

3.1.1. Tersedianya Lapangan Pekerjaan

Dalam konsep *Development Diplomacy* pada sebuah proses membangun citra positif di luar negeri, yang sebagian besar dilakukan melalui kegiatan hubungan bilateral dan memiliki peran pada posisi internasional berdasarkan transfer bantuan yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan negara-negara berkembang. *Development Diplomacy* berupaya untuk mengkalibrasi ulang hubungan donor dengan dan di dalam negara dengan itu memberikan ekspresi potensi imbalan ganda dan kemakmuran bersama yang terwujud melalui saling ketergantungan yang lebih besar antara pembangunan donor dan kebijakan luar negeri (Gulrajani et al., 2020).

Pada salah satu Visi Saudi 2030 Arab Saudi yang bertujuan untuk membuka bakat, potensi, dan dedikasi para pemuda dan pemudi kita, dan menjanjikan investasi berkelanjutan di bidang pendidikan serta pelatihan sehingga populasi muda lebih siap untuk pekerjaan di masa depan dan diwujudkan dengan bantuan dari kebijakan melalui kerjasama *Belt and Road Initiative* dengan koordinasi strategi pada pembangunan untuk memperluas kerjasama kapasitas industri di kawasan.

Sehingga beberapa tahun terakhir pemerintah Arab Saudi mengalami perombakan besar yang berusaha untuk membangun lingkungan investasi yang lebih menguntungkan dan saling memberi keuntungan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menyalurkan bantuannya untuk masuk ke pasar Arab Saudi. Dimana pasar tenaga kerja di negara minyak ini mengalami salah satu transformasi paling cepat di dunia. Ini semakin kondusif bagi popularitas adanya *Belt and Road Initiative* Tiongkok, dan Arab Saudi menjadi pendukung kuat *Belt and Road Initiative*.

Dengan adanya kesepakatan *Belt and Road Initiative* pemerintah Arab Saudi mengalami perubahan disinergikan melalui Visi Saudi 2030 dimana lapangan kerja yang awalnya ketergantungan dari tenaga kerja asing seperti India dan Pakistan berubah ke pekerja Arab Saudi sendiri. Dimana warga negara Arab Saudi khususnya wanita Saudi dapat masuk ke pasar tenaga kerja dengan dipicu oleh reformasi baru yang menargetkan pekerjaan perempuan. Visi Saudi 2030 memiliki tujuan yang berambisi untuk mengamankan pekerjaan pada warga negaranya sendiri yang berarti

memberikan peluang pekerjaan untuk warga Saudi. Hal tersebut untuk mengurangi tingkat pengangguran bagi warga negara Saudi, meskipun peningkatan absolut pada jumlah pengangguran diharapkan ketika populasi suatu negara tumbuh, persentase pengangguran di antara semua pencari kerja telah meningkat cukup besar dari 6,8 % pada tahun 1999 menjadi 12,8 % pada tahun 2017. Seperti kebanyakan negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, Arab Saudi memiliki populasi remaja muda yang terus bertambah.

Sejak jatuhnya harga minyak global yang mengalami tekanan untuk menghasilkan pendapatan non-minyak dan menyediakan lebih banyak pekerjaan bagi warga Saudi. Adanya peningkatan biaya untuk pekerja asing dan tanggungan, serta kebijakan di dalam Visi Saudi 2030 yang mengharuskan bisnis tertentu untuk mempekerjakan kuota pekerja Saudi telah menyebabkan gangguan dalam beberapa kegiatan sektor swasta dan dapat menyebabkan penurunan tingkat konsumsi domestik. Hal tersebut mendorong pemerintah Arab Saudi untuk menerapkan beberapa langkah yang dapat mengurangi lemahnya iklim investasi negara pada masa ke depan dapat memperlambat perekonomian yang diperkirakan akan menyebabkan permintaan yang lebih rendah untuk produk minyak dan petrokimia Arab Saudi.

Akibatnya menundukkan pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada minyak. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenakan biaya pada tanggungan pekerja asing dan membatasi orang asing untuk bekerja di sektor tertentu. Adapun pembuat kebijakan Saudi untuk

menempatkan Kerajaan pada jalur pembangunan yang lebih berkelanjutan, karena Kementerian Tenaga Kerja secara ketat memberlakukan program baru yaitu Nitaqat yang bertujuan memotivasi perusahaan sektor swasta untuk mempekerjakan lebih banyak warga Saudi.

Namun, sementara kuota Nitaqat hampir memaksa lebih banyak warga Saudi masuk ke sektor swasta sambil membebankan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi pada sektor swasta, hal itu juga menyebabkan sejumlah besar penutupan bisnis bahkan pada saat harga minyak tinggi dan kredit mudah, Kondisi buruk yang berasal dari ketergantungan lama membuat Arab Saudi berkontribusi pada Kerajaan mengadopsi Visi Saudi 3020 untuk mengembangkan ekonomi politik baru. Upaya lain oleh pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja bagi warga negara Saudi melalui “Saudisasi” tenaga kerja. Saudisasi bertujuan untuk mempekerjakan lebih banyak orang Saudi dalam pekerjaan yang saat ini diisi oleh pekerja asing dengan menutup kesenjangan biaya bagi majikan antara ekspatriat dan nasional.

Pekerja ekspatriat dari Asia Selatan dan negara-negara Arab lainnya mendominasi angkatan kerja Saudi dan sektor swasta khususnya karena kesediaan mereka untuk bekerja dengan upah yang lebih rendah, dengan jam kerja yang lebih lama, seringkali di bawah kondisi kerja di bawah standar. Warga non-Saudi ada di sekitar 60% orang yang bekerja di Arab Saudi, dan 80% karyawan di sektor swasta. Banyak ekspatriat bekerja di konstruksi, sebagai sopir atau pekerja rumah tangga, dan di posisi lain yang sejauh ini enggan diisi oleh orang Saudi. Meningkatnya

biaya, sebagai bagian dari perbaikan ekonomi yang dimaksudkan untuk membuat Arab Saudi tidak terlalu bergantung pada minyak. Diversifikasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja bagi kaum muda keduanya penting bagi Kerajaan untuk mencapai keberlanjutan ekonomi (Alqahtani, 2019).

Pada persentase pemuda pengangguran diklasifikasikan sebagai usia 15-24 tahun meningkat dari 27,1 % pada tahun 2015 menjadi 31,2 % pada tahun 2016. pada akhir 2016, total pengangguran di Arab Saudi adalah 5,6 % dan 21,3 % untuk wanita, dan tingkat pengangguran di antara orang Saudi jauh lebih tinggi pada 12,3 % dan 34,5% untuk wanita. Selain itu, pengangguran jauh lebih umum di kalangan kaum muda dengan tingkat hampir setengahnya yang menganggur. Walaupun sebagian besar di Arab Saudi hanya setengah pengangguran namun, tetap menjadi masalah yang signifikan, terutama bagi perempuan, yang menyebabkan hilangnya efisiensi di tingkat perusahaan dan dalam perekonomian secara keseluruhan. Sehingga Arab Saudi berambisi untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan, terutama bagi warga Saudi dan terutama di sektor swasta melalui Visi Saudi 2030.

Pada tahun 2016, ada sekitar tiga kali lebih banyak pekerjaan di sektor publik dibandingkan sektor swasta, dengan hampir 70 % orang Saudi dipekerjakan oleh Pemerintah. Sebagai bagian dari transisi ekonomi Arab Saudi, Visi Saudi 2030 bermaksud untuk menciptakan lebih dari 450.000 pekerjaan sektor swasta pada tahun 2020 dan memotong ukuran pegawai negeri sebesar 20%. Pemerintah bermaksud untuk mengurangi

jumlah keseluruhan uang yang dibelanjakan untuk upah menjadi 40 % dari yang awalnya 45%. Upah sektor swasta telah meningkat, dengan upah bulanan rata-rata untuk sektor swasta Saudi meningkat SR5.625 (\$ 1.500) pada tahun 2015, sebesar 6,7% dari tahun ke tahun. Upah untuk non-Saudi di sektor swasta meningkat 12,2% tahun ke tahun. Didorong oleh reformasi pasar tenaga kerja seperti Saudisasi, sistem perlindungan upah, dan koreksi status pekerja asing, pertumbuhan lapangan kerja untuk orang Saudi di sektor swasta terus melampaui pertumbuhan pekerjaan non-Saudi (Update, 2017).

Sedangkan untuk aktivitas permintaan tenaga kerja dalam negara Arab Saudi dimana dalam perekonomian, permintaan modal, pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, dan substitusi antara tenaga kerja, modal, dan bahan bakar saling terkait. Total lapangan kerja terdiri dari pekerjaan pertanian, pemerintah, dan swasta non-pertanian. Pekerjaan industri swasta non-pertanian tergantung pada permintaan pekerjaan dan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Pekerjaan sektor swasta tersedia untuk orang Saudi dan ekspatriat yang diciptakan melalui permintaan dari konsumsi lokal, ekspor, aktivitas investasi, aktivitas pemerintah, dan permintaan antara. Pada tahun 2017, ada sekitar 730.000 pekerjaan sektor swasta penuh waktu dan paruh waktu yang tersedia di manufaktur Arab Saudi, dan pekerjaan diproyeksikan meningkat pada CAGR 1,4 % hingga 2030.

Dari pekerjaan ini, sekitar 357.000 didorong oleh pekerjaan ekspor. Pekerjaan ekspor memiliki CAGR yang diproyeksikan sebesar 2%,

memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan lapangan kerja, diikuti oleh aktivitas permintaan lapangan kerja investasi CAGR 1,1 %. Jumlah terbesar pekerjaan sektor swasta diciptakan oleh administrasi publik dan pengeluaran pertahanan, dengan perkiraan 2,16 juta pekerjaan pada tahun 2017. Pekerjaan sektor swasta diproyeksikan meningkat pada CAGR 1,4 %. Sebagian besar pekerjaan sektor swasta di ruang ini sebesar 1,71 juta dibutuhkan untuk memenuhi permintaan barang dan jasa oleh pengeluaran pemerintah.

Diperkirakan hingga tahun 2030, permintaan pekerjaan pemerintah diharapkan memiliki CAGR 1,3 %. Pertumbuhan tahunan yang substansial juga diantisipasi dari lapangan kerja permintaan konsumsi lokal 2,1 % dan lapangan kerja permintaan menengah 2,0 %. Untuk Pekerjaan sektor swasta di sektor utilitas diproyeksikan tumbuh sebesar 1,2 % CAGR. Bagian terbesar dari pekerjaan ini adalah permintaan konsumsi lokal dan permintaan menengah; namun, pekerjaan ekspor dan pekerjaan permintaan menengah memiliki proyeksi tingkat pertumbuhan terbesar, masing-masing 3,6 % CAGR dan 1,2 % CAGR. (Update, 2017).

Sehingga dalam konsep *Development Diplomacy* saat ini negara Arab Saudi yang menjalin kerjasama dengan Tiongkok melalui transfer bantuan kebijakan *Belt and Road Initiative* yang kemudian bersinergi dengan Visi Saudi 2030 yang berfokus dan membantu pada peningkatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung integrasi dan interkoneksi kerajaan yang lebih luas dengan ekonomi regional dan internasional melalui tersediannya pasar lapangan pekerjaan.

Dimana khususnya bahwa Tiongkok memiliki kekuatan yang kuat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur dan ada lebih dari seratus perusahaan Tiongkok yang dominan di Arab Saudi yang terlibat dalam berbagai proyek atau program yang terkait dengan real estat, komunikasi, kereta api, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, dan proyek atau program nasional penting lainnya yang dijalankan dapat mengurangi banyaknya pekerja domestik yang pengangguran. Hal ini dikarenakan terdapat keuntungan dari hubungan bilateral Arab Saudi membantu serta memanfaatkan tenaga kerja lokal Arab Saudi agar tumbuhnya perekonomian yang penghasilannya tidak bergantung pada minyak dan modal politik ekonomi antara Arab Saudi.

Dan Tiongkok pada hubungan bilateralnya masih menjadi pemain utama dalam investasi dan konstruksi proyek BRI dan mengembangkan pasar luar negerinya yang mana Tiongkok sebagai konsumen utama minyak bumi Arab Saudi. Walaupun harga minyak yang tidak stabil Tiongkok tetap mengimpor sekitar 70 % dari kebutuhan minyaknya terutama dari Arab Saudi. Dengan bersinerginya kedua proyek ini Tiongkok mengalami pada perekonomiannya yang bergerak secara relatif, dan dapat mengambil tempat yang lebih sentral dalam reformasi yang diupayakan oleh Arab Saudi.

3.1.2. Perubahan Pendapatan Anggaran Pemerintah

Dalam *Development Diplomacy* menjelaskan bahwa transfer bantuan bertujuan untuk mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan negara dimana bentuk bantuan tersebut berupa sumbangan, pinjaman,

penghapusan utang, investasi atau bantuan secara teknis berupa pelatihan, konseling, dan keahlian. *Development Diplomacy* didasarkan pada klaim pembauran kepentingan domestik dan internasional yang lebih besar. Dimana *Development Diplomacy* yang berkelanjutan merupakan terampil menavigasi garis tipis dan hubungan antara kepentingan negara, kerja sama luar negeri, pembangunan nasional mereka sendiri, dan tujuan kebijakan luar negeri (Gulrajani et al., 2020).

Dimana pemerintah Arab Saudi melakukan perubahan kebijakan domestik saat nilai harga minyak yang melonjak turun. Saat turunnya harga minyak ini mempengaruhi nilai pendapatan di pemerintahan sehingga perlunya diambil tindakan untuk mengubah kebijakan pada perubahan pendapatan anggaran pemerintah tersebut yang dirasa tidak berdampak negatif pada orang lain pemerintah dapat mengejar pekerjaan yang menjadi kendala pemerintahan seperti pada pajak atau kebijakan industri yang diinginkan. Sehingga integrasi Arab Saudi ke *Belt and Road Initiative* memiliki konsekuensi geopolitik yang kuat bagi kedua negara. Bagi Tiongkok, fakta bahwa Kerajaan Arab Saudi bergabung dengan strategi besarnya menempatkan Tiongkok lebih kuat lagi sebagai pusat daya tarik bagi negara-negara Teluk yang Cukup memberikan pengaruh politik yang penting bagi Tiongkok.

Dengan demikian, Kerajaan Saudi sebagai pengaruh penyeimbang *de facto* antara tetangga yang mengalami kegelisahan di daerah Teluk dan karena faktor pendapatan energi. Dimana Pendapatan anggaran pemerintah berubah dari ketergantungan yang tinggi pada

pendapatan minyak bumi menjadi pendapatan yang lebih beragam, termasuk melalui penerapan pajak dan penciptaan dana kekayaan negara. Penerimaan pendapatan Negara Saudi saat ini adalah semua penerimaan yang diperoleh pemerintah, termasuk pajak, bea cukai, penerimaan dari badan usaha milik negara, penerimaan modal, dan bantuan luar negeri. Penerimaan negara merupakan bagian dari perhitungan neraca anggaran pemerintah (Tranding Economics, 2019).

Dikarenakan jatuhnya harga minyak global harga minyak yang telah \$115 per barel pada 2014 jatuh dengan cepat mencapai \$28 per barel pada 2016 yang akhirnya mempengaruhi keberlangsungan sistem pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang tepat sebelum harga minyak turun pada tahun 2014, pendapatan minyak bertanggung jawab atas 90% pendapatan ekspor, 87% pendapatan anggaran, dan 42% PDB, membuat adanya tekanan untuk menghasilkan pendapatan non-minyak dan menyediakan lebih banyak pekerjaan bagi warga Saudi telah mendorong pemerintah Arab Saudi untuk menerapkan langkah-langkah yang dapat melemahkan iklim investasi negara itu ke depan sehingga pemerintahan mempertimbangkan kembali kontribusi pendapatan industri non-migas yang relatif berkinerja buruk terhadap perekonomian Kerajaan.

Dalam meningkatkan pendapatan, pemerintah akhirnya memperkenalkan 'Pajak Dosa' yaitu yang menggandakan harga rokok, minuman ringan dan minuman energi. Hal tersebut telah lama merencanakan untuk memperkenalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% yang menurut IMF akan meningkatkan pendapatan sebesar 1,5% dari

PDB. Terakhir, pemerintah berencana untuk memperkuat pendapatannya melalui pajak laba perusahaan yang mengenakan pajak 20% atas laba perusahaan non-Saudi, memaksakan pajak zakat islam atas pendapatan yang diperoleh, dan membutuhkan biaya yang semakin mahal untuk visa ekspatriat dan izin pekerja (Eid & Ph, n.d.).

Pangeran Abdul Aziz bin Salman juga telah mengumumkan dimana pada tahun 2020 bahwa Arab Saudi berencana untuk memproduksi 50% listriknya dari sumber terbarukan pada tahun 2030. Serta pemerintah juga mulai mengurangi sejumlah subsidi energi terutama listrik dan bensin yang membebani anggaran dan mendistorsi pasar energi domestik. Pemerintah Arab Saudi juga melalui privatisasi, baik melalui kemitraan publik, swasta atau penjualan dan sewa aset milik negara, sebagai mekanisme lain untuk menumbuhkan sektor swasta, menarik investasi asing, dan meningkatkan pendapatan nonmigas. Visi Program Realisasi Privatisasi ini diumumkan, yang diharapkan pemerintah dapat menghasilkan \$10 miliar pendapatan non-minyak dan 12.000 pekerjaan pada tahun 2020. Beberapa privatisasi tampaknya bertujuan untuk meningkatkan aset Dana Investasi Publik di khususnya, termasuk IPO untuk Aramco (Council, 2020).

Sehingga pada konsep *Development Diplomacy* penanganan jangka pendek yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dengan bantuan Tiongkok pada *Belt and Road Initiative* bekerjasama untuk membangun energi yang terbarukan dan pembuat kebijakan Arab Saudi yang menciptakan Visi Saudi 2030 menghasilkan sumber pendapatan pemerintah alternatif untuk

mencegah pembengkakan pengeluaran anggaran dalam jangka pendek, dan mempromosikan ekonomi jangka panjang yang bebas dari fluktuasi radikal harga minyak.

Pendapatan anggaran pemerintah berubah dari ketergantungan yang tinggi pada pendapatan minyak bumi menjadi pendapatan yang lebih beragam, termasuk melalui penerapan pajak dan penciptaan dana kekayaan negara terhadap kebijakan ekonomi makro menyusul jatuhnya harga minyak pada pertengahan 2014 patut mendapat pujian. Setelah menyaksikan pendapatan minyak anjlok, anggaran menjadi defisit, dan cadangan devisa turun, para pembuat kebijakan Arab Saudi berhasil melalui kebijakan fiskal yang lebih berhati-hati dimulai menstabilkan situasi makro ekonomi pada pendapatannya. Pemerintah mengurangi pengeluaran pemerintah sambil mengembangkan beberapa sumber pendapatan pemerintah baru, secara bertahap membawa anggaran nasional kembali ke lintasan menuju keseimbangan, sehingga membendung arus keluar cadangan devisa.

Dengan melalui IMF, pemerintah Arab Saudi mengembangkan kerangka kerja perencanaan anggaran jangka menengah, yang pada akhir tahun 2019 telah berada di jalur yang aman untuk menyeimbangkan anggaran pada tahun 2023, serta bantuan investasi perusahaan asing dari Tiongkok yang sekaligus sebagai memperluas pasar investasi Tiongkok. Dengan melakukan hal tersebut, Saudi juga akan mereformasi ekonomi politik negara penyewa yang kompleks di Kerajaan. Implementasi Visi Saudi 2030 memberikan peluang besar bagi Tiongkok untuk

mengembangkan kegiatan perdagangan dan investasinya serta meningkatkan ekonomi industri domestiknya yang membuat Tiongkok mengalami pada perekonomiannya bergerak secara relatif. Dimana Arab Saudi agar pendapatnya tidak bergantung pada minyak sehingga Arab Saudi mulai mengembangkan industri petrokimia yang modal proyek petrokimia ini diinvestasikan Saudi di Tiongkok akan mencapai \$35 miliar, dengan total proyeksi produksi 21,7 juta ton pada tahun 2025.

3.2. Pengaruh Sektor Internasional

3.2.1. Perubahan Struktur Industri

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan jatuhnya harga minyak global pada tahun 2014 yang mempengaruhi pemerintah Kerajaan Saudi untuk mempertimbangkan kembali secara keseluruhan yang berhubungan dengan minyak termasuk kontribusi industri non-migas yang relatif kurang berkinerja secara efektif terhadap perekonomian Arab Saudi. Negara-negara industri yang ingin perusahaan domestiknya masuk negara dan digunakan dalam pelayanan tujuan nasional yang komprehensif yang meliputi pemeliharaan pasokan energi utama, meningkatkan perdagangan dan investasi dengan negara mitra dan bahkan meningkatkan kekuatan ideasional.

Terkait Industri non-minyak dan gas ini telah diidentifikasi dalam Visi Saudi 2030 sebagai fokus utama untuk pengembangan lebih lanjut guna membantu mengurangi ketergantungan tradisional pada pendapatan hidrokarbon dan menciptakan peluang kerja sektor swasta bagi warga negara Arab Saudi. Dalam konsep *Development Diplomacy* yang

menerapkan prinsip diplomasi, di mana kesepakatan dinegosiasikan melalui transfer bantuan yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan negara untuk saling membantu memajukan agenda bersama yang saling menguntungkan (Gulrajani et al., 2020).

Dengan metode berkelanjutan untuk mengelola emisi menggunakan empat metode yaitu *reduction*, *reuse*, *recycling* dan *recovery* yang sangat selaras dengan Visi Saudi 2030 bertujuan untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi di setiap sektor Kerajaan Arab Saudi termasuk energi, industri, air, pertanian, dan pariwisata untuk mengubah struktur industri dari ketergantungan ekonomi pada minyak ke bidang diversifikasi seperti energi baru dan pertambangan, mempromosikan pengembangan industri manufaktur seperti pengembangan energi terbarukan dan lokalisasi manufaktur peralatan industri, meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan penghidupan rakyat.

Dimana Arab Saudi mengadopsi konsep *circular carbon economy* (CCE) ini sebagai cara baru untuk mencapai tujuan iklim, dan untuk mendorong upaya yang bertujuan tidak hanya mengurangi akumulasi emisi karbon tetapi juga mengambil manfaat darinya, bersamaan membatasi pada dampak negatif terhadap lingkungan dan menghilangkan emisi dari lingkungan. Membuat Struktur industri berubah dari dominasi berlebihan oleh industri minyak bumi menjadi energi terbarukan seperti tenaga surya dan sektor baru seperti pariwisata. Berdasarkan berbagai industri berorientasi ekspor termasuk minyak dan gas, logam dan pertambangan,

logistik, agrokimia dan makanan dan minuman, mengingat Arab Saudi memiliki output industri terbesar di kawasan MENA.

Sumber daya hidrokarbon substansial Arab Saudi yang mencakup gas dan cairan yang terkait dengan minyak mentah sebagai produksi metana serta biaya ekstraksi yang rendah, yang merupakan output industri ini secara historis didominasi oleh industri terkait minyak dan gas misalnya produksi minyak dan petrokimia.

Dimana Industri petrokimia memainkan peran penting dalam rencana transisi ekonomi Tiongkok dan Arab Saudi. Saudi Aramco dan Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) telah memperkuat kehadiran hilir mereka yang berkembang di Tiongkok melalui kemitraan dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Jumlah proyek petrokimia yang direncanakan dan dibangun di provinsi Fujian, Yunan, Ningxia, Zhejiang dan Liaoning telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, total belanja modal proyek petrokimia yang diinvestasikan Saudi di Tiongkok akan mencapai \$35 miliar, dengan total proyeksi produksi 21,7 juta ton pada tahun 2025 (Chen, 2021).

Pada *Development Diplomacy* kerjasama bilateral kedua negara saat ini arus perdagangan antara Tiongkok dan Arab Saudi juga meningkat. Ekspor transfer donor produk industri Tiongkok ke Arab Saudi mencapai \$28 miliar pada 2020, meningkat 50% sejak 2013. Ekspor minyak mentah Arab Saudi ke Tiongkok tumbuh dari 364 juta barel pada 2013 menjadi 622 juta barel pada 2020. Dimana ekspor transfer donor produk industri Tiongkok ke Arab Saudi dapat memulai dan fokus untuk mengidentifikasi

dan mempromosikan teknologi efisiensi energi dengan potensi terbesar untuk pengembangan industri Saudi yang harga energi tetap menjadi penghalang utama bagi investasi dalam efisiensi energi industri.

Dalam membangun pasar layanan energi terbesar di dunia oleh Tiongkok, Arab Saudi dapat saling mendapatkan keuntungan pembangunan dengan Tiongkok untuk menguji coba dan mendemonstrasikan skema pembiayaan efisiensi energi yang inovatif. Melalui kerjasama bilateral antara Tiongkok-Arab Saudi dimana kerja sama tersebut berfokus pada pelaksanaan bersama tentang insentif kebijakan, instrumen keuangan, dan kerangka peraturan untuk penerapan hidrogen dan CCUS dalam skala besar. Melalui *Belt and Road Initiative* dari Tiongkok dan Visi Saudi 2030 menjadi awal dari poros perkembangan Saudi, yang memiliki konsekuensi geopolitik yang penting (Chen, 2021).

Serta adanya kerjasama industri internasional yang dapat memenuhi kebutuhan praktis dan rencana masa depan Tiongkok dan Arab Saudi, menjadikannya ladang baru untuk memperdalam kerjasama bilateral. Dibawah kerangka kerja Tiongkok dan Saudi, Pembangunan Nasional Tiongkok dan Komisi Reformasi Saudi bersama dengan *Saudi Energy*, dan *Industrial and Mineral Resources* memimpin untuk membentuk sub-komite di *Belt and Road Initiative*. Kerjasama investasi industri dengan proyek besar dan kerjasama energi dimana proyek kedua belah pihak berpusat di dermaga *Belt and Road Initiative* dengan Visi Saudi 2030 Saudi yang telah bersama-sama mengkonfirmasi dua kelompok proyek utama termasuk 48 program kerjasama kapasitas dan investasi

dengan total nilai investasi sebesar \$83 miliar.

Serta juga *Aluminium Corporation of China Limited* memberikan investasi \$1,2 miliar untuk membangun pabrik peleburan aluminium dengan produksi tahunan 1 juta ton di *Jizan Economic City* yang menjadi awal positif untuk kerjasama industri antara Tiongkok dan Arab Saudi. Pada tahun 2016, pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa Visi Saudi 2030, mengusulkan untuk menetapkan zona pengembangan khusus di tempat-tempat dengan kondisi dan menerapkan kebijakan preferensi khusus yang berbeda dari kota ekonomi dan kota industri lainnya untuk menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pengembangan pada Kota Ekonomi Jizan. Berdasarkan visi ini, sesuai dengan konsensus yang dicapai oleh mitra tingkat tinggi kerjasama kapasitas Tiongkok-Arab Saudi, pihak Arab Saudi mengusulkan untuk menetapkan *up zona* pengembangan perusahaan khusus untuk perusahaan Tiongkok di *Jizan Basic Industrial City* dan menerapkan kebijakan investasi yang lebih preferensial untuk perusahaan dengan bantuan dana dari Tiongkok.

Jizan Basic Industrial City merupakan salah satu dari empat kota ekonomi yang dibangun oleh pemerintah Saudi untuk mempercepat pengembangan industri non-migas dalam negeri yang merambah secara internasional. Rencana rancangan tata ruang industri *Jizan Basic Industrial City*, mencakup terdapat industri berat, manufaktur, industri ringan, area perumahan dan area komersial dari selatan ke utara. Untuk industri berat akan fokus pada pengembangan pembangkit energi, stasiun pemurnian air laut, pabrik penyimpanan bahan bakar, pembangkit listrik, dll. Sedangkan

industri ringan akan fokus pada pengembangan bahan baku, produk elektronik, jasa modern, pembuangan sampah, komponen industri, bioteknologi dan teknologi pertanian.

Zona Pengembangan akan berfokus pada pengenalan industri baja, industri petrokimia, industri silikon, dan industri jasa kapal yang dimulai tahun 2020 hingga 2025 serta akan mengawasi pengenalan industri makanan, industri kemasan, perakitan peralatan rumah tangga, perakitan peralatan mekanik dan listrik, dan bahan bangunan. Rencana ini terdaftar oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional sebagai salah satu dari 20 percontohan kapasitas internasional utama pada tahun 2016 dan sebagai kawasan industri penting yang didukung oleh Kementerian Perdagangan. (Yang et al., 2020).

Sehingga pada dari *Development Diplomacy* kerjasama bilateral kedua negara saat ini arus kebijakan perdagangan perindustrian antara Tiongkok-Arab Saudi melakukan peningkatan fleksibilitas sistem tenaga untuk pengembangan industri energi terbarukan dengan rasio tinggi. Proyek-proyek ini dapat berfungsi untuk menetaskan kapasitas layanan efisiensi energi pembangunan di Kerajaan. Dengan itu Implementasi *Belt and Road Initiative* di Arab Saudi menambah keharusan untuk peningkatan infrastruktur dan pengembangan industri baru. Dimana selaras dengan Visi Saudi 2030 yang bertujuan untuk mengubah struktur industri dari ketergantungan minyak ekonomi ke bidang diversifikasi seperti energi baru dan pertambangan, mempromosikan pengembangan industri manufaktur seperti pengembangan energi terbarukan dan lokalisasi

manufaktur peralatan industri, meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kehidupan rakyat.

3.2.2. Perubahan Sumber Investasi

Dalam konsep *Development Diplomacy* pada penggunaan penggunaan transfer donor kembali bantuan sedemikian rupa sehingga mengklaim untuk melayani ambisi dan aspirasi diplomasi kerjasama bilateral yang sekaligus mencapai tujuan pembangunan. Penataan ulang ini terutama terlihat dalam konteks yang berkembang dari keterlibatan Utara dengan pendapatan menengah (Gulrajani et al., 2020).

Dimana terjadinya penurunan investasi dari Arab Saudi ke Tiongkok dikarenakan oleh perubahan dalam industri petrokimia yang sebagian besar investasi Arab Saudi selama dekade terakhir dilakukan di industri. Maka ketika ekonomi di seluruh dunia semakin menjadi berbentuk jaringan dan saling tergantung, instrumen ekonomi kebijakan luar negeri menjadi syarat penting untuk mendapatkan pengaruh dan kontrol atas proses dan peristiwa. Sehingga saat ini, ada lebih dari 100 perusahaan Tiongkok yang dominan di Arab Saudi yang terlibat dalam berbagai proyek atau program yang terkait dengan real estat, komunikasi, kereta api, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, dan proyek atau program nasional penting lainnya.

Namun, investor asing secara konsisten menghadapi tantangan karena pasar petrokimia Tiongkok telah tumbuh. Dimana sebelum 2015, Tiongkok memperlakukan penyulingan minyak bumi sebagai industri nasional yang strategis untuk dikuasai oleh perusahaan minyak milik

negara. Dengan demikian, investor asing hanya dapat memegang 50% saham dalam investasi apapun dikarenakan kurangnya kontrol mayoritas ini cenderung membatasi skala investasi asing. Sedangkan setelah 2015, Tiongkok secara bertahap membuka pasarnya untuk penyulingan dan petrokimia hilir, memfasilitasi investasi asing dan swasta. Namun, kelebihan kapasitas produksi dan polusi berat di Tiongkok telah meningkatkan kekhawatiran tentang investasi dalam bahan kimia (Hong et al. 2019).

Sedangkan Aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Arab Saudi telah turun sejak krisis keuangan global pada tahun 2008. Aliran *Foreign Direct Investment* global ke Asia barat secara umum telah turun di sebagian besar tahun sejak mencapai puncaknya pada \$98 miliar pada tahun 2008. Namun, investasi di Arab Saudi telah turun lebih tajam dan untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan ekonomi tetangga. Turunnya harga minyak dan kurangnya kebijakan yang efektif untuk menarik *Foreign Direct Investment* di sektor non-minyak sebagian besar bertanggung jawab atas penurunan aliran *Foreign Direct Investment* ke Arab Saudi hingga pemerintah Tiongkok telah memberlakukan peraturan lingkungan yang lebih ketat dan memperketat kredit di industri ini.

Persaingan dengan produsen lokal Tiongkok juga semakin meningkat, sehingga sumber investasi berubah dari bergantung pada investasi pemerintah menjadi menarik lebih banyak investasi swasta dan asing, termasuk membuka Saudi Aramco yang merupakan perusahaan

minyak milik negara yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pengelolaan kawasan industri luar negeri Tiongkok dan Arab Saudi sedangkan Saudi Silk Road bertanggung jawab untuk menarik investasi. Dengan adanya nota kesepahaman antara perusahaan minyak nasional Saudi Aramco dan *China North Industries Group Corporation* yang merupakan investasi swasta melalui penawaran umum perdana parsial Strateginya untuk meremajakan ekonomi. Dimana pemerintah Arab Saudi melanjutkan reformasi sosial ekonomi yang berambisi secara kolektif dikenal sebagai Visi Saudi 2030. Dipelopori oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Visi Saudi 2030 menyediakan peta jalan untuk pengembangan sektor ekonomi baru, termasuk pariwisata dan hiburan, dan untuk transformasi signifikan menuju ekonomi digital berbasis pengetahuan yang sebagai sebuah reformasi.

Selanjutnya reformasi ini bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi dari ketergantungannya pada minyak dan menciptakan lebih banyak pekerjaan sektor swasta untuk populasi muda dan berkembang. Reformasi sosial dan ekonomi diresmikan di bawah Visi Saudi 2030 telah meningkatkan lingkungan bisnis di Arab Saudi. Reformasi ini termasuk peraturan baru yang mengizinkan kepemilikan asing total di beberapa industri dan pelonggaran izin investor dan peraturan visa.

Adanya perusahaan asing baru yang memperoleh lisensi di Arab Saudi terutama berasal dari industri dan manufaktur, logistik, ritel, e-commerce informasi dan komunikasi bidang teknologi. Serta reformasi

juga telah mendigitalkan layanan pemerintah dan mencabut pembatasan sosial dan tenaga kerja terhadap perempuan. Dengan mengambil langkah tambahan yaitu meningkatkan iklim investasi Arab Saudi, menarik peningkatan investasi asing, dan mendorong partisipasi sektor swasta domestik dan internasional yang lebih besar dalam perekonomiannya. Merupakan untuk mempercepat pengembangan dan memfasilitasi investasi pemerintah Arab Saudi dan mengangkat dua otoritas Arab Saudi menjadi kementerian penuh pada tahun 2020 yaitu Otoritas Investasi Umum Arab Saudi menjadi Kementerian Investasi, serta Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Saudi menjadi Kementerian Pariwisata (Moshashai et al., 2018).

Saat ini Arab Saudi berusaha menarik investasi asing lebih dari \$100 miliar per tahun di bawah strategi investasi nasional yang diumumkan sebagai bagian dari upaya untuk mendiversifikasi ekonomi yang bergantung pada minyak. Strategi ini juga diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing langsung tahunan menjadi 388 miliar riyal atau \$ 103 miliar dan meningkatkan investasi domestik tahunan menjadi 1,7 triliun riyal pada tahun 2030 yang diperkirakan dapat menjadi pendorong utama dari rencana Visi Saudi 2030, yang diumumkan pada 2016 untuk mendiversifikasi ekonomi pengeksport minyak terbesar dunia (Agence France-Presse, 2021).

Sehingga dapat dilihat pada *Development Diplomacy* pada penggunaan transfer donor kembali investasi bantuan sedemikian rupa sebagai mengklaim untuk melayani ambisi dan aspirasi diplomasi dari

tingkat hubungan bilateral, negara-negara dapat memprioritaskan investasi dalam kapasitas energi terbarukan lokal dan mempromosikan teknologi efisiensi energi. Yang memprioritaskan investasi dalam energi terbarukan adalah Tiongkok sebagai investor terbesar dan sebagai produsen energi angin serta matahari dalam mengembangkan pasar domestik serta internasionalnya, Tiongkok telah membangun kekuatan di seluruh rantai pasokan. Dimana Arab Saudi dapat memanfaatkan dari kekuatan rantai pasokan sumber daya keuangan dan keahlian teknis Tiongkok untuk mencapai ambisinya terkait pengembangan energi terbarukan.

Tiongkok membantu Arab Saudi membangun kapasitas lokal untuk pengembangan teknologi, manufaktur peralatan utama, konstruksi dan operasi proyek. Kedua negara dapat bekerja sama dengan berbagi pengetahuan dan praktik kebijakan, melatih bakat lokal dan mentransfer atau mengembangkan teknologi baru. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam kerangka kerja *Belt and Road Initiative*. Melalui Visi Saudi 2030 terus mendorong pengembangan bentuk-bentuk investasi ekonomi lainnya untuk pembangunan infrastruktur guna menopang ekonomi dan mendiversifikasi perdagangan domestik maupun internasional Saudi.

Di wilayah Arab Saudi yang mana birokrasi dan peraturan yang rumit menghalangi investor, melalui proyek *Belt and Road Initiative* Tiongkok menawarkan bantuan kelonggaran dan telah mengubah perdagangan dan investasi, menghasilkan industri baru dan mendiversifikasi ekonomi yang memberikan kemudahan pada investor yang masuk ke Arab Saudi. Selaras dengan investasi luar negeri Tiongkok

melalui *Belt and Road Initiative* menawarkan cara agar Tiongkok dapat memperoleh status sebagai pelopor pembangunan global.

Pada saat yang sama melalui *Belt and Road Initiative*, Tiongkok mencoba memposisikan diri dalam peran kepemimpinan, berkontribusi pada pembangunan regional, konektivitas, dan bahkan stabilitas sampai batas tertentu. Dimana promosi kerjasama kapasitas Tiongkok dan Arab Saudi, lebih lanjut mempromosikan integrasi *Belt and Road Initiative* dan Visi Saudi 2030 saling mendukung untuk meningkatkan rasa saling percaya untuk pembangunan yang saling menguntungkan pada kerjasama bilateral ini. Sehingga kedua negara telah diuntungkan dari struktur investasi perdagangan yang saling melengkapi. Seperti Tiongkok memiliki keunggulan dalam produk manufaktur, sedangkan Arab Saudi sangat kompetitif dalam produk energi (CDB et al. 2017).

Serta ekspor dari Arab Saudi ke Tiongkok didominasi oleh produk minyak bumi dan petrokimia yang berupa 99% bahan bakar mineral, kimia organik dan plastik, sedangkan ekspor dari Tiongkok ke Arab Saudi terdiri dari komoditas industri, peralatan listrik sekitar 70%, mesin, furnitur, pakaian dan alas kaki. Dari investasi impor dan ekspor tersebut dapat menurunkan hambatan perdagangan dapat menawarkan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tiongkok dan Arab Saudi telah menjalin hubungan yang dekat dan bersahabat serta memiliki kepentingan bersama yang luas terlepas dari perbedaan ideologis mereka, yang terlihat dari nama mereka. *Belt and Road Initiative* diiringi dengan Visi Saudi 2030 ditujukan untuk mengembangkan proyek infrastruktur dan menurunkan biaya transportasi untuk memperbaiki dampak dari ketergantungan terhadap minyak bumi yang menghubungkan kesepakatan perdagangan lintas batas antara Tiongkok. Selain itu terlepas Arab Saudi, sebagai pusat yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, telah menjadi bagian penting dari inisiatif tersebut Hal ini berdampak terhadap investasi Arab Saudi.

Sebelum mengetahui pengaruh dari kebijakan proyek *Belt and Road Initiative* terhadap politik dan ekonomi Arab Saudi, pada BAB 2 penulis memaparkan terlebih dahulu terkait bagaimana sejarah adanya *Belt and Road Initiative*, dan perkembangan *Belt and Road Initiative* Tiongkok maupun Arab Saudi. Pada perkembangan hubungan kerjasama antara Tiongkok dan Arab Saudi. Penyelarasan strategi ekonomi ini telah mendorong peningkatan hubungan Tiongkok- Arab Saudi. Selama kunjungan Presiden Xi Jinping ke Riyadh pada Januari 2016, kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mempromosikan *Belt and Road Initiative* dan kerjasama kapasitas industri. Kunjungan ini meningkatkan hubungan bilateral Tiongkok-Saudi menjadi kemitraan strategis

komprehensif, tingkat tertinggi dalam hierarki hubungan diplomatik Tiongkok

Sehingga berdasarkan pada BAB 3, penulis membuktikan pengaruh dari kebijakan proyek *Belt and Road Initiative* yang dijalankan Tiongkok terhadap politik dan ekonomi Arab Saudi dengan konsep *Development Diplomacy*. Dalam mengembangkan pasar domestiknya, Tiongkok telah membangun kekuatan di seluruh rantai pasokan. Arab Saudi dapat memanfaatkan sumber daya keuangan dan keahlian teknis Tiongkok untuk mencapai ambisinya terkait pengembangan energi terbarukan dan untuk mengembangkan pembangunan perekonomian serta politiknya.

Dengan menggunakan konsep *Development Diplomacy* yang dibangun di atas kepentingan bersama dan Tiongkok dapat membantu Arab Saudi membangun kapasitas lokal untuk pengembangan teknologi, manufaktur peralatan utama, investasi, konstruksi serta operasi proyek dan Tiongkok dapat mengembangkan pasarnya serta pemerintah domestik maupun internasional. Kedua negara bekerja sama saling memberikan suntikan donor transfer bantuan agar hubungan bilateral keduanya dapat saling menguntungkan dan berjalan dengan baik, berupa dengan berbagi pengetahuan dan praktik kebijakan, melatih bakat lokal dan mentransfer atau mengembangkan teknologi baru. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam kerangka kerja *Belt and Road Initiative* yang bersinergi dengan Visi Saudi 2030. Tujuan strategis *Belt and Road Initiative* adalah untuk meningkatkan hubungan infrastruktur dan logistik serta merangsang kegiatan perdagangan dan investasi. Visi Saudi 2030 bertujuan untuk

membangun ekonomi yang terdiversifikasi yang tidak bergantung pada minyak bumi. Implementasi *Belt and Road Initiative* di Arab Saudi menambah keharusan untuk peningkatan infrastruktur dan pengembangan industri baru. Dimana keduanya memiliki banyak keuntungan, dimana Tiongkok mencari pasokan energi dan ingin memperluas kepentingan strategisnya dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Sedangkan Arab Saudi di sisi lain, dapat mengambil manfaat dari bantuan yang diversifikasi hubungan kerjasama dan memperluas hubungannya dengan kekuatan politik ekonomi yang meningkat.

4.2 Rekomendasi

Tulisan hasil dari riset ini terkait yang telah dilakukan oleh penulis serta argumen-argumen yang tertulis dalam penelitian ini dirasa masih memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan mampu untuk mendorong adanya penelitian lanjutan bagi para penelitian lainnya. Keterbatasan yang dimaksud memiliki terkait dengan pengaruh kerjasama *Belt and Road Initiative* Tiongkok untuk melakukan kerjasama pada Arab Saudi.

Penelitian ini menggunakan konsep *Development Diplomacy* dan sangat mungkin adanya untuk penelitian lanjutan ataupun penelitian yang lain terkait dengan tema penelitian ini, sehingga hal tersebut akan mendorong adanya sudut pandang yang baru dan lebih variatif sehingga dapat digali secara luas dengan memakai konsep lain ataupun dilihat dari sudut pandang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2019). *China dan 18 Negara Arab Teken Kerja Sama Proyek OBOR Rp497 T*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190714110044-92-411933/china-dan-18-negara-arab-teken-kerja-sama-proyek-obor-rp497-t>. Diakses : 17 Oktober 2020.
- Agence France-Presse. (2021). *No Title. Saudi Arabia Targets \$100 Billion Yearly In Foreign Investment*. <https://www.ndtv.com/world-news/saudi-arabia-targets-100-billion-yearly-in-foreign-investment-2572271>
- Alqahtani, K. M. (2019). Does Saudi Arabia Benefit From China's Belt and Road Initiative? *Journal of Management and Strategy*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.5430/jms.v11n1p1>
- Cai, P. (2017). Understanding China's Belt and Road Initiative. *Lowy Institute, March* 1–26. [https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding China's Belt and Road Initiative_WEB_1.pdf](https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China's%20Belt%20and%20Road%20Initiative_WEB_1.pdf)
- Chatham house. (2021). *No Title. What is China's Belt and Road Initiative (BRI)?* [chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-initiative-bri](https://www.chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-initiative-bri).
- Chen, D. (2021). China's Belt and Road Initiative and Saudi Vision 2030: A Review of the Partnership for Sustainability. *King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, May* 1–30. <https://doi.org/10.30573/KS-2021-DP016>
- Council, A. (2020). *ASSESSING SAUDI VISION 2030: A 2020 REVIEW*.
- CGTN. (2018) Chinese-built Mecca Light Railway praised by Hajj pilgrims. 30 August. Available at:

https://news.cgtn.com/news/3d3d514f7a55444f79457a6333566d54/share_p.html (accessed 10 april 2022)

- Diez T (2013) Normative power as hegemony. *Cooperation and Conflict* 48(2): 194–210. *Energy Information Administration (EIA) of the US (2015) China: International Energy Data and Analysis*. 14 May. Available at: <https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=CHN>(accessed 22 April 2022).
- East, T. M., East, M., East, M., East, M., Science, P., Eder, M., Affairs, I., Kiri, K., & Relations, I. (n.d.). <*political economy of the regional cooperation in MENA .pdf*>.
- Eid, A. G., & Ph, D. (n.d.). *Budgetary Institutions, Fiscal Policy, and Economic Growth: The Case of Saudi Arabia*.
- Ferdinand P (2016) Westward ho – the China dream and “one belt, one road”: Chinese foreign policy under Xi Jinping. *International Affairs* 92(4): 941–957.
- Fulton, J., & Atlantic Council of the United States. (2020). *Strangers to strategic partners: thirty years of Sino-Saudi relations*. 20.
- Garlick, J., & Havlová, R. (2020). China’s “Belt and Road” Economic Diplomacy in the Persian Gulf: Strategic Hedging amidst Saudi–Iranian Regional Rivalry. *Journal of Current Chinese Affairs*, 49(1), 82–105. <https://doi.org/10.1177/1868102619898706>
- Gulrajani, N., Mawdsley, E., & Roychoudhury, S. (2020). *The new development diplomacy in middle-income countries. The changing role of traditional donors in India*. February. <https://www.odi.org/publications/16604-new->

development-diplomacy-middle-income-countries-changing-role-
traditional-donors-india

Guzansky, Y., Lavi, G., & Turki, P. (n.d.). *Saudi Arabia-China Relations: A Brave Friendship or Useful Leverage?*

Gotora, E., Okumu, P., Platform, T. A., Sengupta, R., Researcher, S., Network, T. W., & Delhi, N. (2014). *Constructive engagement*.

Council, A. (2020). *ASSESSING SAUDI VISION 2030: A 2020 REVIEW*.

Gulrajani, N., Mawdsley, E., & Roychoudhury, S. (2020). *The new development diplomacy in middle-income countries. The changing role of traditional donors in India. February*. <https://www.odi.org/publications/16604-new-development-diplomacy-middle-income-countries-changing-role-traditional-donors-india>

Guzansky, Y., Lavi, G., & Turki, P. (n.d.). *Saudi Arabia-China Relations: A Brave Friendship or Useful Leverage?*

Hong, Sheng, Yifan Jie, Xiaosong Li, and Nathan Liu. (2019). "China's Chemical Industry: New Strategies for a New Era." McKinsey Insight. <https://www.echemi.com/cms/34610.html>

Juan, C., Meng, S., & Shaobiao, W. (2018). Aligning china's belt and road initiative with saudi arabia's 2030 vision: Opportunities and challenges. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 4(3), 363–379. <https://doi.org/10.1142/S2377740018500203>

ONE BELT, ONE ROAD" AND CHINA" S WESTWARD PIVOT Past, Present and Future (Issue November). (2017).

- Moshashai, D., Leber, A. M., & Savage, J. D. (2018). Saudi Arabia plans for its economic future: Vision 2030, the National Transformation Plan and Saudi fiscal reform. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 00(00), 1–21. <https://doi.org/10.1080/13530194.2018.1500269>
- Osiander, A. (2001). Sovereignty, international relations, and the Westphalian myth. *International Organization*, 55(2), 251–287.
- SEVILLA, H. A. (2017). China's New Silk Route Initiative: Political and Economic Implications for the Middle East and Southeast Asia. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 11(1), 83–106. Agence France-Presse. (2021). No Title. *Saudi Arabia Targets \$100 Billion Yearly In Foreign Investment*. <https://www.ndtv.com/world-news/saudi-arabia-targets-100-billion-yearly-in-foreign-investment-2572271>
- Silk Road to Belt Road. (2019). In *Silk Road to Belt Road*. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-2998-2>
- Tranding Economics. (2019). No Title. *Saudi Arabian Monetary Agency, Saudi Arabia Government Revenues*. <https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/government-revenues>
- Update, A. L. M. (2017). *Working in Saudi Arabia : A Labor Market Update*.
- YANG, F. (2014). Invigorating Sino-Arab Relations by “One Belt and One Road” Strategy. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 8(4), 1–25.
- Zielińska, K. (2016). *Development Diplomacy. Development Aid as a Part of Public Diplomacy in the Pursuit of Foreign Policy Aims: Theoretical and Practical Considerations*. *Historia i Polityka*, 16(16 (23)), 9.

<https://doi.org/10.12775/hip.2016.009>

- ZOU, Z., & AHMED, G. K. (2016). *China and the Middle East Economic Governance in New Era*. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 10(3), 73–97
- Council, A. (2020). *ASSESSING SAUDI VISION 2030: A 2020 REVIEW*.
- Gulrajani, N., Mawdsley, E., & Roychoudhury, S. (2020). *The new development diplomacy in middle-income countries. The changing role of traditional donors in India*. February. <https://www.odi.org/publications/16604-new-development-diplomacy-middle-income-countries-changing-role-traditional-donors-india>
- Guzansky, Y., Lavi, G., & Turki, P. (n.d.). *Saudi Arabia-China Relations: A Brave Friendship or Useful Leverage?*
- Juan, C., Meng, S., & Shaobiao, W. (2018). Aligning china's belt and road initiative with saudi arabia's 2030 vision: Opportunities and challenges. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 4(3), 363–379. <https://doi.org/10.1142/S2377740018500203>
- Zielińska, K. (2016). Development Diplomacy. Development Aid as a Part of Public Diplomacy in the Pursuit of Foreign Policy Aims: Theoretical and Practical Considerations. *Historia i Polityka*, 16(16 (23)), 9. <https://doi.org/10.12775/hip.2016.009>